HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
31 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

RABU, 4 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 17

TEKNOLOGI

Waspada! Spyware Canggih Incar Pengguna iPhone di Puluhan Negara, Begini Cara Melindungi HP

Oleh Van · 4 Nov, 21.54 WIB



Tampilan layar beranda iPhone yang rapi dengan berbagai aplikasi dan widget.

JAKARTA — Pengguna iPhone perlu mewaspadai ancaman perangkat lunak mata-mata atau spyware canggih yang dapat digunakan untuk menyerang perangkat secara tertarget.

Apple kembali mengirimkan notifikasi ancaman kepada sejumlah pengguna yang diduga menjadi sasaran serangan mercenary spyware. Dilansir dari lama The Telegraph Rabu, (4/11/2026) peringatan tersebut dilaporkan menjangkau pengguna di 99 negara.

Informasi mengenai gelombang peringatan terbaru ini disampaikan periset keamanan siber Costin Raiu melalui akun X miliknya @costinrau.

Dia menyebut notifikasi tersebut berbeda dari gelombang peringatan yang dikirim Apple pada Agustus 2026.

Apple menyatakan telah mengirimkan notifikasi ancaman kepada pengguna di lebih dari 150 negara sejak program peringatan tersebut dimulai.

Perusahaan tidak mengungkap identitas pelaku maupun wilayah geografis yang diduga menjadi sumber serangan.

Apa Itu Mercenary Spyware?

Mercenary spyware merupakan perangkat lunak mata-mata yang dikembangkan untuk menjalankan operasi pengawasan terhadap individu tertentu.

Berbeda dari malware yang menyebar secara massal, spyware jenis ini biasanya digunakan untuk menargetkan orang berdasarkan identitas, aktivitas, atau pekerjaan mereka.

Apple menjelaskan bahwa serangan semacam ini membutuhkan biaya dan sumber daya besar.

Selengkapnya di halaman 28 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 22
OPINI 26
Aneka Berita 28

NASIONAL

Puluhan Ribu Prajurit Dikerahkan ke Jakarta, Ini Penjelasan TNI



BANDA ACEH - Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul membenarkan adanya pengerahan pasukan militer dalam jumlah besar ke Jakarta.Hal ini disampaikan merespons kabar yang menyebut TNI AL akan menerjunkan lebih dari 20 ribu prajurit dalam waktu dekat.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diduga Dalang Penyadapan Prabowo, Aktivis 98: Tangkap dan Penjarakan Jokowi!



BANDA ACEH - Aktivis 98 Jayadi Santoso mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kak Na: PAUD Holistik Integratif Penting untuk Penuhi Kebutuhan Dasar Anak



SUBULUSSALAM – Pembinaan Anak Usia Dini yang Holistrik Integratif merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak usia dini secara menyeluruh dan saling terkait. Karena itu, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Usman atau yang akrab …

Selengkapnya di halaman 22 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Nanggroe dan Kajati Aceh Sepakat Perkuat Sinergi Lembaga



BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, beserta rombongan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Selasa (3/11/2026).

Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, pertemuan itu menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat …

Selengkapnya di halaman 23 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

43 BERITA

NASIONAL

Puluhan Ribu Prajurit Dikerahkan ke Jakarta, Ini Penjelasan TNI

Oleh Redaksi · 4 Nov, 21.57 WIB



BANDA ACEH - Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul membenarkan adanya pengerahan pasukan militer dalam jumlah besar ke Jakarta.Hal ini disampaikan merespons kabar yang menyebut TNI AL akan menerjunkan lebih dari 20 ribu prajurit dalam waktu dekat.

"Kami sampaikan bahwa informasi tentang pengerahan personel TNI AL tersebut adalah benar," kata Tunggul dalam keterangan resmi yang diterima Inilah.com, Rabu (4/11/2026).

Tunggul menjelaskan penurunan ribuan prajurit merupakan bagian dari tugas negara. Di mana, mereka diamanatkan menjaga stabilitas dan keamanan negara.

"Pengerahan personel tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara dan menjaga stabilitas keamanan Republik Indonesia," ujarnya.

Tunggul pun memastikan penurunan puluhan ribu prajurit ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

TNI AL Kerahkan 20.980 Personel untuk Perkuat Pengamanan Jakarta, Ada Apa?

"Mobilisasi prajurit adalah bagian integral dari kesiapsiagaan TNI untuk melindungi seluruh rakyat serta menjaga keutuhan NKRI, yang senantiasa dilaksanakan berlandaskan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Selain itu, Tunggul juga mengungkap mobilisasi prajurit TNI AL dan marinir ini sejalan dengan giat pasukan. Mereka nantinya akan melakukan operasi pendaratan khusus dan tembus gelombang di beberapa daerah.

"Pergeseran pasukan tersebut juga berkaitan dengan persiapan latihan Operasi Pendaratan Khusus di Tanjung Burung dan Tanjung Pasir Tangerang serta latihan Tembus Gelombang di Rancecet, Pandeglang yang akan dilaksanakan oleh TNI AL dalam waktu dekat," tuturnya.

Sebelumnya, Berdasarkan informasi yang beredar, TNI AL mengerahkan 20.980 personel untuk mendukung pengamanan perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta.

Pengerahan pasukan tersebut dilaksanakan secara bertahap berdasarkan instruksi dalam Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang dilihat pada Rabu (4/11/2026).

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan mengatakan, pengerahan personel dibagi menjadi empat tahap. Pasukan berasal dari berbagai satuan TNI AL, baik yang berada di Jakarta maupun luar daerah, untuk diperbantukan di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya.

"Mohon izin melaporkan rencana pengerahan pasukan penebalan pengamanan perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta," ujar Yayan, Selasa (3/11/2026).

Pengerahan tahap pertama telah dimulai pada 2 November 2026 dengan melibatkan 2.100 prajurit dari satuan TNI AL di wilayah Jakarta.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diduga Dalang Penyadapan Prabowo, Aktivis 98: Tangkap dan Penjarakan Jokowi!

Oleh Redaksi · 4 Nov, 20.13 WIB



BANDA ACEH - Aktivis 98 Jayadi Santoso mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah.Menurut Jayadi, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara dan kewibawaan pemerintahan. Karena itu, penyelidikan harus diarahkan untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik dugaan tindakan tersebut.

"Jokowi harus diperiksa. Kalau memang ditemukan bukti keterlibatan dan perannya sebagai pihak yang memerintahkan, tangkap dan penjarakan. Jangan hanya berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan operasi di lapangan," tegas Jayadi, Rabu (4/11/2026).

Ia mempertanyakan kemungkinan mantan Kapolri Listyo Sigit melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tanpa adanya perintah atau kepentingan dari pihak lain. Namun, Jayadi menilai dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan, bukan hanya dibangun berdasarkan asumsi Politik.

Jayadi juga menyoroti hubungan panjang Listyo Sigit dengan Jokowi. Menurut dia, kedekatan keduanya telah terjalin sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Hubungan tersebut kemudian berlanjut ketika Jokowi menjadi Presiden RI dan Listyo Sigit dipercaya menduduki jabatan Kapolri.

"Listyo Sigit bukan orang yang tiba-tiba muncul dalam lingkaran kekuasaan. Hubungannya dengan Jokowi sudah berlangsung sejak Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Ketika Jokowi menjadi presiden, Listyo kemudian dipercaya menjadi Kapolri," ujarnya.

Ia juga menilai masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri yang berlangsung cukup lama patut menjadi bagian dari pertanyaan politik yang perlu ditelusuri. Jayadi menduga kedekatan dan kepercayaan politik antara keduanya memiliki arti penting dalam membaca hubungan kekuasaan pada masa pemerintahan Jokowi.

Bagi Jayadi, persoalan ini tidak boleh berubah menjadi pertarungan politik antarkelompok elite. Jika benar terjadi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, negara harus mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari pelaksana, pemberi perintah hingga pihak yang memperoleh manfaat.

"Jangan sampai hukum hanya tajam kepada pelaksana, tetapi tumpul terhadap pihak yang diduga berada di belakangnya. Siapa pun orangnya, termasuk mantan presiden, harus tunduk pada hukum apabila terdapat bukti yang cukup," katanya.

Jayadi menegaskan, Presiden Prabowo sebagai kepala negara harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan ilegal yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PDIP Pertanyakan Siapa yang Nyuruh Sigit Sadap Prabowo: Apakah Perintah Jokowi?

Oleh Redaksi · 3 Nov, 22.29 WIB

BANDA ACEH - Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyampaikan reaksi menohok menyikapi penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam skandal penyadapan secara ilegal (illegal wiretapping) dan peretasan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Guntur mempertanyakan aktor intelektual maupun pihak pemberi perintah di balik aksi penyadapan rahasia yang menyasar saluran komunikasi Kepala Negara tersebut.

Melalui unggahan di akun X pribadinya yang dikutip pada Selasa (3/11/2026), Guntur menilai peristiwa penangkapan mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara ini sebagai catatan sejarah kelam ketatanegaraan.

"Siapa yang Menyuruh Listyo Sigit Menyadap Presiden Prabowo? Apa Jokowi?" tulis Guntur Romli dilansir dari X pribadinya, Selasa (3/11/2026).

"Malam ini sejarah mencatat: seorang mantan Kapolri, jenderal yg dipilih dan dilantik Jokowi, ditetapkan tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia," ucapnya.

Guntur menegaskan bahwa aksi peretasan dan penyadapan ilegal terhadap simbol negara merupakan pelanggaran hukum kelas berat yang berpotensi mengarah pada tindakan subversif.

"Kami tegaskan: penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan pelanggaran biasa. Itu kejahatan serious terhadap negara. Itu pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Dan bila terbukti dilakukan untuk menggerogoti kewibawaan kepala negara, itu makar dalam bentuk paling licik," ujarnya.

Ia lantas mengurai janggalnya motif pribadi seorang perwira tinggi dalam melakukan tindakan berisiko tinggi tanpa adanya sokongan atau perintah dari kekuatan tertentu.

"Lalu pertanyaan yang tak bisa dihindari: ini kejahatan pribadi, atau ada perintah? Jika pribadi, untuk apa jenderal di puncak karier menyadap presidennya sendiri? Jika ada perintah, siapa pemberinya?" tanyanya.

"Penyadapan diduga terjadi sepanjang 2025–2026. Pada periode itu, atasan formal Listyo Sigit adalah Presiden Prabowo, yg justru menjadi korban. Mustahil korban menyuruh dirinya sendiri disadap. Artinya, kalau ada perintah, perintah itu datang dari luar struktur resmi negara," ungkapnya.

Guntur secara terbuka juga menyenggol spekulasi keterlibatan lingkaran mantan presiden dalam pusaran kasus ini.

"Maka publik wajar bertanya: kepada siapa sebenarnya loyalitas Listyo Sigit? Kepada Presiden yg sah, atau kepada patron lamanya, Jokowi, presiden yg mengangkatnya menjadi Kapolri?"

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit Rencanakan Makar? Ini Kata Yusril

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.36 WIB

BANDA ACEH - Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah ketahuan menyadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo, Mabes Polri juga menangkap dan menetapkan dua jenderal lainnya, Irjen Pol Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, sebagai tersangka dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa malam (3/11/2026). Betulkah perbuatan tiga jenderal ini terkait makar?Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan sampai saat ini belum ada indikasi penyadapan tersebut terkait makar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mensesneg: Dugaan penyadapan Kepala Negara mengarah ke makar

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.44 WIB



BANDA ACEH - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berpendapat dugaan kasus penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar."Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Prasetyo mengatakan tindakan tersebut juga mengarah pada perbuatan yang membahayakan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Dia menilai tindakan penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara merupakan tindakan serius, terlebih karena hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kalau melakukan tindak penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, ilegal akses untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita dan ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara, nah ini kan sesuatu yang luar biasa," kata dia.

Prasetyo menyebut pemerintah belum mengetahui secara terperinci motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung di kepolisian.

"Jadi kita tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya," ujarnya.

Dia mengatakan dugaan penyadapan terhadap pimpinan negara perlu menjadi perhatian karena terdapat informasi sensitif yang dapat membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara.

"Kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara, di situ kan banyak informasi yang tentu sangat sensitif, yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," katanya.

Terkait penanganan perkara tersebut, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto agar proses hukum dilakukan secara objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Presiden juga meminta agar penanganan kasus tersebut dilakukan sebaik-baiknya tanpa ada informasi yang ditutup-tutupi.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11), mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril: Kasus penyadapan terhadap Presiden mengarah pada tindakan makar!

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.20 WIB



BANDA ACEH – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara mulai menunjukkan indikasi tindak pidana makar. Namun, indikasi tersebut masih merupakan kesimpulan sementara dan belum menjadi hasil akhir penyidikan.Yusril mengatakan, pengembangan penyidikan kasus yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri itu menemukan dugaan motif yang lebih luas dari sekadar penyadapan. Aparat penegak hukum kini mendalami tujuan serta kepentingan di balik tindakan tersebut.

Hal itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Yusril menjelaskan, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik. Salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, satu orang lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Menurut Yusril, pada tahap awal penyidikan, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penyadapan serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai intersepsi elektronik.

Namun, seiring pengembangan perkara, penyidik mulai mendalami motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut. Dari hasil pendalaman sementara, muncul indikasi yang mengarah pada kemungkinan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP.

Yusril menegaskan, indikasi tersebut belum menjadi kesimpulan final karena proses pendalaman masih berlangsung. “Kesimpulan sementara, belum kesimpulan final, bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah ke tindakan makar,” ungkap Yusril.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka pada tahap awal dilakukan berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik.

Meski demikian, pengembangan penyidikan tidak hanya berfokus pada perbuatan penyadapan. Penyidik juga menelusuri motif, tujuan, serta kepentingan yang ingin dicapai melalui penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.

Yusril mengatakan, dari pengembangan perkara mulai ditemukan indikasi yang mengarah pada dugaan makar, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 KUHP.

“Ketika mulai dikembangkan akan ketahuan ini motifnya untuk apa melakukan penyadapan, ke mana tujuan dari penyadapan itu. Mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah ke satu tindakan makar, paling tidak seperti yang diatur dalam Pasal 193 dari …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mantan Kapolri jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Apa Tujuannya dan Kepada Siapa Dilaporkan?

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.49 WIB

BANDA ACEH – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Penetapan ini diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam.Selain Listyo (inisial LSP), dua tersangka lain adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN, Kadivkum Polri) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH). Satu orang berinisial SU (Slamet Uliandi) masih berstatus saksi dan dalam pemeriksaan.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping) terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh Politik, media/jurnalis, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Aktivitas tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Menurut keterangan resmi, penyadapan dilakukan dengan memasukkan nomor target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa dasar proses penegakan hukum (penyelidikan atau penyidikan). Mereka juga diduga memerintahkan penghapusan file dan jejak log pada Oktober 2026 untuk menutupi aktivitas tersebut. Tindakan ini melanggar prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Hingga saat ini, motif atau tujuan spesifik penyadapan belum diungkapkan secara rinci oleh pihak Polri. Yang ditegaskan adalah bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki kaitan dengan proses penegakan hukumyang sah dan dilakukan di luar prosedur resmi. Beberapa pengamat sebelumnya mendesak Polri menjelaskan motifnya karena kasus ini menyangkut kerahasiaan pejabat negara.

Kasus ini bermula dari laporan internal. Seorang petugas Polri yang mengetahui adanya perintah penyadapan dan penghapusan data di luar prosedur kedinasan membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Bareskrim dengan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan penyitaan barang bukti.

Tidak ada informasi resmi bahwa hasil penyadapan dilaporkan oleh para tersangka kepada pihak tertentu di luar. Justru mereka diduga berusaha menghilangkan jejak digitalnya.

Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli. Barang bukti yang disita antara lain 11 unit handphone, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kelompok Jokowi dan Listyo Sigit Tidak Akan Tinggal Diam!

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.22 WIB

BANDA ACEH - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim imbas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025.Publik sudah mengetahui bahwa LSP merupakan orang yang tegak lurus terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut pakar ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy, kubu Jokowi-LSP tidak akan tinggal diam terhadap tindakan ini.

“Penyadapan (dilakukan) 2025-2026, maka mustahil tidak ada tujuan politik. Lalu apa tujuan politik mereka jika LSP adalah kaki tangan Jokowi? Akankah Jokowi diam? No, ini terkait keputusan MK dan MA,” kata Noorsy kepada RMOL di Jakarta, Selasa malam, 3 November 2026.

Ia menduga hal ini juga terkait dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentunya, hal itu sudah diantisipasi Jokowi dari jauh hari.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bungkam Soal Aliran Uang ke Muktamar NU, Nusron Wahid Malah Bahas Izin ke LN

Oleh Redaksi · 4 Nov, 19.05 WIB



BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan aliran uang ke Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nusron justru merespons mengenai polemik perjalanan dinas ke luar negeri. Ia menegaskan, setiap perjalanan dinas yang dilakukan seorang menteri, baik ke luar kota maupun ke luar negeri, dipastikan memiliki surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Saya pejabat publik seorang menteri, kalau dinas ke luar kota apa lagi keluar negeri, dipastikan ada surat ijin perjalan dari kementerian sekretariat negara jadi kami tidak mengada ada titik," kata Nusron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore, 4 November 2026.

Namun demikian, saat ditanya soal dugaan aliran uang ke Muktamar NU, hubungannya dengan para tersangka hingga dugaan keterlibatannya dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Nusron enggan meresponsnya.

Sebelumnya, KPK telah dua kali menjadwalkan pemeriksaan Nusron sebagai saksi. Pada pemanggilan pertama, Nusron menyampaikan tidak dapat hadir karena memiliki agenda di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Setelah dijadwalkan ulang, Nusron kembali tidak hadir dengan alasan memiliki kegiatan di luar negeri.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 Dolar AS, 1.974.500 Dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

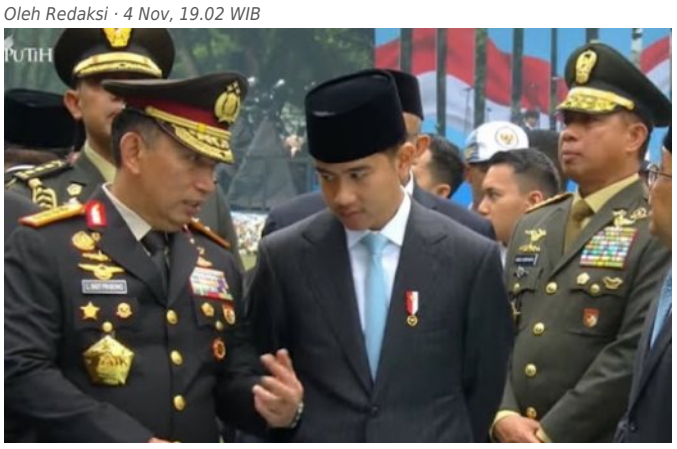
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengaruh Geng Solo Mulai Diputus Usai Penangkapan Listyo Sigit Dkk

Oleh Redaksi · 4 Nov, 19.02 WIB



BANDA ACEH -Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri memunculkan spekulasi mengenai pertarungan Politik di lingkaran kekuasaan.

Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, menilai kasus tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika persaingan antara kelompok yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau kerap disebut Geng Solo dengan kelompok Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sebagai Geng Hambalang.

"Berita ini mengagetkan kita semua dan mengingatkan kita tentang pertarungan politik yang tengah terjadi antara dua kubu, yakni kubu Jokowi, yang sering disebut sebagai geng Solo, dengan kubu Prabowo (Geng Hambalang). Secara politik, peristiwa tersebut bisa dipandang sebagai rentetan peristiwa yang berupaya memutus pengaruh geng Solo dalam kekuasaan politik Presiden Prabowo Subianto," kata Ali kepada wartawan, Rabu, 4 November 2026.

Menurut Ali, dinamika tersebut juga terlihat dari pergantian sejumlah pejabat yang dinilai memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Ia memperkirakan kelompok yang terdampak perubahan konfigurasi kekuasaan tersebut tidak akan tinggal diam menghadapi perkembangan politik yang terjadi.

"Secara normatif kubu Jokowi kemungkinan tidak akan tinggal diam dan sangat mungkin melakukan perlawanan," ungkapnya.

Kendati begitu, Ali berharap persaingan politik di lingkaran elite tidak sampai mengganggu stabilitas nasional maupun kehidupan masyarakat.

"Sebagai warga negara, kita berharap agar pertarungan politik tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026.

Ketiganya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan sekretaris pribadinya Irjen Ahrie Sonta (ASN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) yang menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi.

"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam, 3 November 2026.

Ketiganya diduga melakukan penyadapan di luar tugas institusi kepolisian dalam kurun waktu 2025 hingga Oktober 2026.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

NASIONAL

Listyo Sigit dan Tersangka Penyadapan Presiden Didesak Dihukum Mati!

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.40 WIB

BANDA ACEH - Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).Para tersangka diduga menyadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah pejabat negara dan tokoh publik.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

"Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta Nasution), EH (Eko Hadi)," kata Asep.

Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Asep mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat dan tokoh penting di Indonesia.

Sasaran penyadapan tersebut, menurut Asep, mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut turut mendapat perhatian mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Melalui akun Instagram miliknya, Ferdinand menyampaikan pandangan keras mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Ferdinand menilai penyadapan tersebut merupakan bagian dari makar dan kejahatan serius terhadap negara.

Ia bahkan mendesak agar para pelaku dijatuhi hukuman mati.

"Pidanakan dengan hukuman mati," tulis Ferdinand dalam unggahannya.

Pernyataan Ferdinand tersebut merupakan opini pribadi.

Adapun penentuan jenis dan berat hukuman terhadap para tersangka tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyadapan ilegal di Indonesia dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, bergantung pada bentuk perbuatan dan sarana yang digunakan.

Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 31 juncto Pasal 47 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ketentuan ini mengatur larangan intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi elektronik maupun transmisi informasi elektronik.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Prabowo, Muncul Dugaan Sosok Berinisial ‘J’

Oleh Redaksi · 3 Nov, 22.12 WIB

BANDA ACEH - Politikus sekaligus putri Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais, menyoroti penetapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Menurut Hanum, kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut berlangsung selama periode 2025-2026 itu bahkan lebih gila dibandingkan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

"Jendral Pol L S P tersangka utama dalam penyadapan komunikasi Presiden pejabat tokoh Politik ormas media pengusaha dan semua tokoh tanpa dasar hukum dan prosedural selama 1 tahun! Gila! Ini Sambonya Sambo!" tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (3/11).

Hanum juga menduga ada sosok yang memerintahkan Listyo Sigit untuk melakukan tindakan tersebut.

"Pertanyaannya: Siapa yang menyuruh perintah itu? Jawab L : J," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aktivis NU: Polri Saja Bisa Kena Tipu Jokowi, Apalagi Kemendikbud, KPU dan Bawaslu

Oleh Redaksi · 4 Nov, 20.15 WIB



BANDA ACEH - Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, melontarkan pernyataan kritis terkait pengaruh dan manuver Politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai, bukan hanya partai politik yang pernah dibesarkan Jokowi yang bisa terseret dalam persoalan politik, tetapi institusi negara sebesar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun bisa mengalami hal serupa.Pernyataan Islah tersebut menyindir dugaan kemampuan Jokowi memainkan strategi politik yang dinilainya rumit da sulit dibaca. Bahkan, menurut dia, drama dan modus politik yang digunakan Jokowi memiliki pola yang canggih.

Islah menyampaikan sindiran tersebut melalui pernyataan yang mempertanyakan bagaimana institusi sebesar kepolisian bisa ikut terseret dalam persoalan yang dikaitkan dengan manuver politik Jokowi, Rabu (4/11/2026).

Menurut Islah, jika institusi sebesar Polri saja bisa terseret dalam persoalan yang dikaitkan dengan manuver Jokowi, maka persoalan yang melibatkan lembaga lain seperti Kemendikbud, KPU, dan Bawaslu juga patut menjadi perhatian publik.

Pernyataan Islah muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) menetapkan Listyo Sigit bersama dua jenderal polisi lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem penyadapan Polri tanpa proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.

Salah satu nomor yang menjadi sasaran dugaan penyadapan adalah milik Presiden Prabowo. Penyidik juga mengusut dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. L

Kasus ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan lain di balik dugaan penyadapan tersebut. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang membuktikan keterlibatan atau perintah Jokowi dalam perkara itu.

Pernyataan Islah pun menambah panjang perdebatan mengenai relasi kekuasaan, loyalitas politik, dan independensi institusi negara.

Publik kini menunggu pengusutan perkara tersebut secara transparan. Tidak hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa operasi tersebut dilakukan.

NASIONAL

Siapa yang Disadap? Sumber Sebut Prabowo dan Teddy, Sejumlah Jenderal Diamankan

Oleh Redaksi · 3 Nov, 19.20 WIB

BANDA ACEH – Beredar isu kuat di lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan aktivitas penyadapan terhadap pejabat tinggi negara.

Salah satu target yang disebut adalah Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Isu ini dikaitkan dengan penangkapan atau pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Menurut laporan sejumlah media yang mengutip sumber internal, operasi pengamanan dilakukan pada dini hari Selasa (3/11/2026).

Aktivitas penyadapan diduga dilakukan secara terkoordinasi dari sebuah rumah di Kompleks Widya Chandra, kawasan yang dikenal sebagai tempat tinggal pejabat tinggi negara.

Beberapa perwira yang disebut dalam berbagai laporan dan beredarnya tangkapan layar grup WhatsApp internal Polri antara lain:

- Irjen Pol. Ahrie Sonta (Kadivkum Mabes Polri) — dikabarkan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Ia disebut sempat mengaku bertindak atas perintah atasan.

- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri) — juga dikabarkan ditahan.

- Kombes Pol. Ferly Hediyat/Ferli Hidayat (Koorspripim Polri) — disebut ikut diamankan.

- Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri, kini anggota Wantimpres) — dikabarkan diamankan untuk diperiksa (BAP), namun kemudian dilepas. Beberapa sumber menyebut ia sebagai sosok yang memberi perintah.

- Irjen Pipit Rismanto (Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Politik dan Keamanan) — disebut masih menjalani pemeriksaan.

Beberapa sumber menyebut sejumlah perwira tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, meski Mabes Polri belum memberikan konfirmasi resmi.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa informasi yang beredar masih sebatas rumor di media sosial.

Ia mengaku belum menerima konfirmasi resmi dari instansi terkait maupun arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu,” ujar Yusril.

Ia meminta publik bersabar menunggu penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Mabes Polri akan memberikan penjelasan terkait dinamika yang berkembang.

“Berkaitan sama konteks, dinamika yang nanti mungkin rekan-rekan akan bertanya, dalam sore menjelang malam nanti, nanti kami dari Divhumas akan melaksanakan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dewan Jenderal Polisi Goyang Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 17.37 WIB



Kasus dugaan penyadapan ilegal di tubuh Polri bukan sekadar skandal sejumlah jenderal. Adakah “Dewan Jenderal Polisi”, jaringan kekuasaan informal yang mampu mengendalikan sumber daya kepolisian dan memengaruhi Politik nasional? Jika hipotesis ini terbukti, siapa sebenarnya yang mengendalikan Polri: Kapolri, Presiden, atau kekuatan lain di balik institusi?

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri bukan sekadar persoalan penyalahgunaan kewenangan. Perkara ini membuka pertanyaan yang jauh lebih serius: apakah Polri masih sepenuhnya berada di bawah kendali rantai komando formal, atau ada jaringan kekuasaan informal yang mampu menggunakan sumber daya dan instrumen kepolisian untuk kepentingan di luar tugas institusi?

Pertanyaan itu semakin penting ketika sejumlah jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat, dan pengusaha. Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta dua perwira tinggi lainnya ikut terseret. Sementara itu, beberapa pejabat lain masih diperiksa dalam proses penyidikan. Polri juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Skala perkara ini sulit dipahami sebagai persoalan individual semata. Dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut melibatkan perwira-perwira tinggi yang memiliki atau pernah memiliki akses ke posisi strategis dan sumber daya institusi. Proses hukum tentu harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, publik juga berhak bertanya bagaimana praktik semacam ini bisa terjadi, siapa yang mengendalikan operasinya, dan sejauh mana kewenangan institusi telah digunakan untuk kepentingan tertentu.

Saya menyebut kemungkinan keberadaan jaringan tersebut sebagai "Dewan Jenderal Polisi". Istilah ini bukan merujuk pada organisasi formal yang sudah terbukti ada. Ini adalah hipotesis tentang kemungkinan terbentuknya kelompok informal perwira tinggi yang memiliki kepentingan bersama, membangun koordinasi di luar struktur komando, serta mempunyai akses terhadap informasi dan sumber daya institusi untuk memengaruhi keputusan strategis.

Hipotesis itu tidak cukup dibangun dari kedekatan personal atau kesamaan kepentingan sejumlah perwira. Ada beberapa hal yang perlu ditelusuri. Apakah mereka membentuk jaringan dengan loyalitas yang bertahan melampaui pergantian jabatan? Apakah jaringan tersebut memiliki pengaruh terhadap penempatan pejabat, akses informasi, dan pengelolaan sumber daya kepolisian? Adakah instruksi atau koordinasi operasional yang berjalan di luar rantai komando resmi?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.25 WIB



BANDA ACEH - Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi-Gibran Disebut Jadi Dalang di Balik Dugaan Makar Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.44 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai pernyataan Istana mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dapat mengubah peta Politik nasional. Ia bahkan menyinggung kemungkinan keterlibatan Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Komentar tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tindakan penyadapan yang diduga melibatkan Listyo Sigit Prabowo berpotensi mengarah pada perbuatan makar.

Melalui akun X pribadinya, Rabu (4/11/2026), Jhon menilai pernyataan Istana membuat ruang pembelaan bagi kelompok tertentu semakin sempit.

"Istana menyatakan tindakan Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto dikategorikan dalam perbuatan MAKAR," ucap Jhon dilansir dari X pribadinya, Rabu (4/11/2026).

Ia kemudian melontarkan dugaan mengenai kemungkinan adanya perintah dari pihak lain di balik kasus tersebut. Jhon secara khusus menyebut nama Jokowi dan Gibran.

"Selesai sudah ruang gerak geng Solo untuk membela diri. Akan sangat berbahaya jika dugaan makar ini ada komando dari Jokowi atau Wapres Gibran," ucapnya.

Jhon juga mengaitkan perkara tersebut dengan peluang pemakzulan Gibran. Menurutnya, apabila dugaan keterlibatan itu terbukti, persoalan tersebut dapat menjadi dasar politik dan hukum untuk mendorong proses pemakzulan.

"Jika demikian, jalan untuk MEMAKZULKAN Gibran terbuka lebar dengan alasan TINDAK PIDANA BERAT dan perbuatan tercela," ungkapnya.

Ia turut menilai posisi Listyo Sigit semakin sulit setelah kasus tersebut dikaitkan dengan dugaan makar.

"Listyo benar-benar tidak akan diampuni kali ini, karena MAKAR adalah perbuatan tindak pidana berat dan hukumannya bisa hukuman MATI," pungkasnya.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi menyatakan dugaan penyadapan terhadap Prabowo tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa karena berpotensi membahayakan kepentingan negara dan keselamatan kepala negara.

"Ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Meski demikian, Prasetyo mengaku belum mengetahui secara terperinci motif di balik dugaan penyadapan yang disebut melibatkan Listyo dan dua perwira tinggi lainnya, termasuk siapa pihak yang menerima hasil penyadapan.

"Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat," jelasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dari Solo hingga Istana, Begini Awal Kedekatan Jokowi dan Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.32 WIB

BANDA ACEH — Hubungan profesional Joko Widodo (Jokowi) dan Listyo Sigit Prabowo mulai terjalin ketika keduanya sama-sama bertugas di Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada 2011. Saat itu, Jokowi menjabat Wali Kota Solo, sementara Listyo dipercaya memimpin Polresta Surakarta.Pertemuan dalam lingkup pemerintahan daerah tersebut menjadi awal perjalanan panjang hubungan keduanya. Jokowi bertanggung jawab memimpin pemerintahan kota, sedangkan Listyo menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah yang sama.

Salah satu peristiwa besar yang terjadi selama Listyo menjabat Kapolresta Surakarta adalah aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton pada September 2011. Ledakan tersebut menewaskan pelaku dan menyebabkan sejumlah orang terluka.

Peristiwa itu menjadi bagian dari situasi keamanan yang dihadapi Surakarta pada masa kepemimpinan Jokowi sebagai wali kota dan Listyo sebagai kepala kepolisian setempat.

Sebelum menduduki jabatan Kapolresta Surakarta, Listyo telah meniti karier di lingkungan Polri melalui sejumlah penugasan di Jawa Tengah. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 tersebut pernah menjabat Kapolres Pati dan Kapolres Sukoharjo.

Pada 2011, ia mendapat promosi menjadi Kapolresta Surakarta. Penugasan tersebut menempatkannya dalam koordinasi pemerintahan daerah yang dipimpin Jokowi bersama Wakil Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo.

Hubungan profesional keduanya berlanjut setelah Jokowi meninggalkan Balai Kota Solo dan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014.

Pada 30 Oktober 2014, Listyo yang saat itu berpangkat Komisaris Besar Polisi ditunjuk menjadi ajudan Presiden Jokowi. Penugasan tersebut membawanya dari lingkungan kepolisian daerah ke Istana Kepresidenan.

Sebagai ajudan, Listyo bertugas mendampingi Presiden dalam berbagai kegiatan resmi serta menjalankan tanggung jawab pengamanan dan koordinasi. Posisi itu menjadi pengalaman baru dalam perjalanan kariernya, sekaligus kembali mempertemukannya dengan Jokowi dalam lingkup tugas kenegaraan.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan, Listyo kembali menempati sejumlah jabatan strategis di kepolisian. Ia pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kapolda Banten, hingga Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Kariernya kemudian mencapai salah satu posisi penting ketika dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada 6 Desember 2019.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gerindra Minta Polri Dalami Kemungkinan Upaya Makar Listyo Sigit cs

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.33 WIB



BANDA ACEH - Aparat kepolisian diminta untuk mendalami kemungkinan adanya upaya makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI yang telah menjerat eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Sugiono dalam keterangan resminya, dikutip Rabu, 4 November 2026.

Sugiono berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius dan seksama, mengingat kedudukan Presiden RI sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

“Dalam pandangan saya, tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi. Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini menambahkan bahwa seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap konstitusi serta kepemimpinan nasional yang sah.

Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Sugiono mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pelaksanaan agenda pembangunan nasional di tengah berbagai dinamika yang berkembang.

“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berbagai agenda transformasi bangsa yang sedang dijalankan merupakan amanah besar yang harus terus kita kawal bersama demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Sugiono, upaya penegakan hukum dan pembenahan kelembagaan perlu berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Seluruh unsur pemerintahan diharapkan tetap menjaga koordinasi, soliditas, dan semangat pengabdian agar berbagai program strategis nasional dapat berjalan secara optimal.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta memastikan agenda pembangunan nasional terus berjalan dengan baik. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, saya meyakini setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Lebih jauh, Sugiono juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan status tersangka terhadap sejumlah perwira tinggi Polri.

Proses tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gawat! Polri Tetapkan LSP Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.20 WIB

BANDA ACEH - Penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access. Penetapan itu disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026)."Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP, ASN, EH," katanya.

Sementara satu orang lagi, menurut Asep, masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu saudara SU.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh Politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep.

NASIONAL

Publik Curiga Bocor Alus Tempo Selalu Dapat Info Istana, Diduga dari Hasil Sadapan Listyo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.05 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memicu spekulasi baru di ruang publik.

Sejumlah netizen menduga hasil sadapan tersebut tidak hanya mengalir ke "Geng Solo", tetapi juga menjadi sumber informasi bagi podcast *Bocor Alus Politik* Tempo yang selama ini dikenal selalu mendapat bocoran soal dinamika Istana.

Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal lainnya—Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso—sebagai tersangka.

Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha sepanjang 2025–2026.

Nomor dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.

Pada Oktober 2026, file hasil sadapan beserta log sistem diduga dihapus, sebelum akhirnya dilaporkan petugas pada 30 Oktober 2026.

Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, memperkuat narasi aliran informasi tersebut.

Ia menyatakan yakin produk final hasil penyadapan sampai ke Solo (yang diasosiasikan dengan "Geng Solo" atau lingkungan Jokowi).

Menurutnya, informasi itu digunakan untuk membaca arah langkah target dan merancang cara mengganggunya.

Mahfud juga menilai tindakan tersebut bisa mengarah ke perbuatan makar.

Dari pernyataan Mahfud itu, spekulasi publik meluas ke podcast Bocor Alus Politik Tempo.

Podcast yang dibawakan jurnalis Tempo ini terkenal dengan "bocoran alus" soal politik Istana, reshuffle, dan manuver di balik layar.

Netizen mengaitkannya dengan fakta bahwa tim Bocor Alus sempat diundang Jokowi ke Solo untuk wawancara, serta kemampuan podcast tersebut secara konsisten menghadirkan informasi yang sulit diakses media lain.

Komentar Netizen yang Viral

Spekulasi ini meledak di media sosial, terutama X (Twitter). Salah satu unggahan yang mendapat respons besar berbunyi:

"SAYA CURIGA BOCOR ALUS TEMPO JADI PENADAH HASIL SADAPAN GENG LISTYO. MAKANYA YG DIUNDANG KE SOLO YA MEREKA."

Unggahan tersebut mendapat ribuan likes dan ratusan repost. Komentar lain yang muncul antara lain:

- "ini yg ada di kepala gw... mungkin ga sih bocor alus Tempo itu salah satu informan nya petinggi polri yg terlibat penyadapan? ... terlebih mereka pernah sowan ke solo?"
- "@tempodotco patut diduga menikmati bocoran hasil penyadapan LSP dkk. Tim bocor alus sdh 2x diundang ke Solo."

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril Sebut Dugaan Motif Listyo Sadap Presiden untuk Lumpuhkan Kekuasaan Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.38 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut penyidik Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam kasus penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Menurut Yusril, dugaan tersebut muncul dari pengembangan penyidikan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam penyadapan dan intersepsi elektronik terhadap Presiden.

"Kalau dikatakan (untuk) membunuh, ya tidak. Tapi mengarah kepada satu keinginan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami oleh para penyidik Bareskrim saat ini," kata Yusril dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan, penyidik tidak hanya mendalami perbuatan penyadapan, tetapi juga motif, tujuan, serta arah penggunaan hasil penyadapan tersebut.

Pada tahap awal, penyidik telah menetapkan tersangka berdasarkan dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik. Namun, setelah perkara dikembangkan, ditemukan indikasi yang mengarah pada dugaan upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Yusril menyebut, dugaan tersebut berkaitan dengan rumusan Pasal 191 KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal itu mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Meski demikian, Yusril menegaskan kemungkinan penerapan pasal tersebut masih didalami penyidik dan belum menjadi kesimpulan final.

"Ada pasal-pasal lain juga terkait dengan makar, karena ada pemerintahan itu dimaksudkan untuk melumpuhkan pemerintahan sehingga tidak berfungsi, tapi ini memang intersepsi sekarang ini memang spesifik ditujukan kepada presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Mabes Polri mengumumkan penahanan tiga perwira tinggi Polri yakni Listyo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri setelah menjalani pemeriksaan.

Hingga kini, berdasarkan keterangan Yusril, penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap motif dan kemungkinan tindak pidana lain di balik dugaan penyadapan tersebut.

NASIONAL

Berbarengan Kedatangan Jokowi di Jakarta, Kabar Pengamanan Sejumlah Jenderal Polri

Oleh Redaksi · 3 Nov, 17.31 WIB

BANDA ACEH - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini berada di Jakarta.

Ia berangkat dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah, beberapa hari lalu untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa).

Sidang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026.

Polres Metro Jakarta Timur sudah menyiapkan pengamanan berlapis tiga ring di lokasi persidangan.

Jokowi dan ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, juga dijadwalkan bersaksi.

Pihak pengadilan dan jaksa penuntut umum telah mengonfirmasi rencana kehadiran mantan Presiden itu.

Di waktu yang hampir bersamaan, beredar kabar penangkapan atau pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Informasi yang beredar sejak dini hari Selasa (3/11/2026) menyebut para perwira dibawa ke Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok.

Nama-nama yang disebut dalam berbagai laporan dan pesan internal yang beredar di antaranya Irjen Pol Ahrie Sonta (Kepala Divisi Hukum Mabes Polri) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Beberapa sumber juga menyebut keterlibatan perwira berpangkat jenderal bintang empat berinisial L, yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sejumlah laporan menyebut Listyo sempat diperiksa sebelum kemudian dilepas.

Dugaan yang berkembang adalah terkait aktivitas penyadapan terkoordinasi terhadap petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir merespons bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan dan evaluasi internal.

Ia menyatakan Polri akan memberikan penjelasan lebih lanjut, termasuk melalui konferensi pers yang dijadwalkan sore menjelang malam hari ini.

Hingga sore ini, belum ada konfirmasi resmi lengkap dari Mabes Polri mengenai identitas, jumlah, status hukum, atau motif pasti dari pengamanan tersebut.

Kehadiran Jokowi di Jakarta murni terkait agenda sidang kasus ijazahnya, sementara kabar pengamanan jenderal Polri masih berstatus informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi.

Perkembangan kedua isu ini terus dipantau publik mengingat sensitivitasnya, baik terkait kasus hukum yang melibatkan mantan Presiden maupun dinamika internal Polri pasca-pergantian Kapolri beberapa waktu lalu.

Mabes Polri dijanjikan akan memberikan klarifikasi resmi dalam waktu dekat.

NASIONAL

Effendi Gazali Sebut Kasus Penyadapan Presiden sebagai Makar! 'Ini akan Terbaca untuk Apa'

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.57 WIB

BANDA ACEH - Pakar komunikasi Politik Effendi Gazali menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum. Dia bahkan menyebut kasus tersebut sebagai tindakan makar.Pernyataan itu disampaikan Effendi setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo.

"Ini bukan hanya soal penyadapan. Saya mau mengatakan pada malam ini, ini soal makar," kata Effendi dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (3/11/2026) malam.

Effendi menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menunjukkan persoalan serius. Dia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan pihak dari dalam negeri, bukan semata-mata ancaman dari luar negeri.

"Makar lah. Jadi ternyata yang selama ini dinyatakan oleh Pak Prabowo itu ada antek-antek asing, ternyata asingnya di dalam ini loh," ujarnya.

Menurut Effendi, dugaan penyadapan tersebut mengindikasikan pelakunya memiliki kemampuan profesional. Dia menilai situasi itu menjadi ironi karena ancaman yang sebelumnya dibayangkan berasal dari pihak asing justru diduga melibatkan orang dalam.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dasco Masuk Bursa Pengganti Gibran? Pengamat Bongkar Skenario Politik Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.31 WIB



BANDA ACEH - Peta Politik nasional berpotensi berubah drastis jika jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terguncang oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah spekulasi tersebut, muncul dua nama yang disebut-sebut berpeluang masuk dalam radar Presiden Prabowo Subianto: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Prabowo kemungkinan besar akan memilih sosok pengganti dari lingkaran dalam koalisi pemerintahan apabila MK membatalkan pelantikan Gibran.

Mengingat Kembali Pernyataan Kepala Bakom Syahganda Naingolan: Gibran Tak Bisa Dimakzulkan

Elnusa Terus Bangun SDM Unggul dan Budaya Berkinerja Tinggi untuk Perkuat Resiliensi Bisnis

Menurut Ray, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut posisi wakil presiden, melainkan juga berpotensi memicu turbulensi politik di internal koalisi pendukung pemerintah.

Namun, ia meyakini gejolak tersebut masih bisa dikendalikan oleh Prabowo. Karena itu, kecil kemungkinan Prabowo mencari figur dari luar lingkaran koalisi.

“Cuma kalau soal gejolak internal tentu bisa di-manage oleh Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo enggak akan mencari (wapres) dari luar,” kata Ray Rangkuti dikutip pada (4/11/2026).

Ray bahkan menyebut nama Bahlil Lahadalia sebagai salah satu kandidat paling kuat. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil dinilai memiliki posisi strategis dalam konfigurasi politik pemerintahan.

Namun, ada satu nama lain yang menurut Ray patut diperhitungkan: Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengaitkan kemungkinan tersebut dengan hasil reshuffle kabinet sebelumnya. Ray melihat adanya sejumlah figur yang dinilainya berseberangan dengan Jokowi dan memiliki kedekatan politik dengan Dasco.

“Saya sudah berulang kali mengatakan setidaknya nama Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar mungkin yang paling kuat. Tetapi kalau melihat hasil reshuffle kemarin, di mana kelihatan banyak orang yang anti-Pak Jokowi yang dekat dengan Dasco, jangan-jangan Dasco dipersiapkan untuk itu juga.”

Pernyataan tersebut sontak membuka ruang spekulasi baru. Apakah Dasco sedang dipersiapkan sebagai alternatif pengganti Gibran? Ataukah Bahlil tetap menjadi figur yang paling diperhitungkan jika skenario pergantian wakil presiden benar-benar terjadi?

Di tengah panasnya spekulasi politik tersebut, satu pertanyaan mulai mengemuka: jika kursi Wapres benar-benar kosong, siapa yang paling dipercaya Prabowo untuk mendampinginya?

NASIONAL

Gibran Terancam Dimakzulkan, 98 Juta Pengikut Jokowi Ancam Duduki dan Tutup Jakarta

Oleh Redaksi · 3 Nov, 18.31 WIB

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu reaksi keras dari kelompok pendukungnya.

Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, bahkan mengancam akan mengerahkan massa untuk menduduki dan menutup Jakarta apabila upaya pemakzulan terhadap Gibran terus didorong.

Fritz menyebut para pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran selama ini memilih diam.

Namun, dia mengingatkan agar pihak-pihak yang mendorong pemakzulan tidak menganggap sikap tersebut sebagai tanda bahwa para pendukung Gibran tidak akan melakukan perlawanan.

“Singa lagi tidur. 98 juta pengikut Pak Jokowi dan Gibran lagi tidur. Jangan bangunkan. Jangan sampai kita tutup Jakarta,” kata Fritz dalam pernyataannya, Selasa (3/11/2026).

Dia bahkan mengancam akan mengerahkan massa untuk turun ke Jakarta dan membuat ibu kota mengalami kemacetan total sebagai bentuk protes terhadap pihak-pihak yang mendorong pemakzulan Gibran.

“Kalau sampai kita turun demo, maka saya minta Jansen Sitindaon bertanggung jawab. Saya minta Denny Indrayana dan Eks HTI Khozinudin bertanggung jawab,” ujarnya.

Fritz secara khusus menantang Jansen Sitindaon untuk berdebat secara langsung mengenai persoalan hukum maupun kebijakan terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Saya tantang kamu. Di mana kamu, undang saya. Kita Debat secara langsung. Debat hukum atau debat kebijakan atau debat tentang Wapres Gibran,” katanya.

Dia juga memperingatkan agar tidak ada lagi ancaman pemakzulan terhadap Gibran dengan membawa-bawa nama DPR maupun MPR.

Menurut Fritz, Pasukan Gibran Indonesia bersama masyarakat yang selama ini mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan tinggal diam apabila wacana tersebut terus disuarakan.

“Jangan Anda ancam Wapres Gibran dimundurkan. Ancam dengan membawa nama DPR, ancam dengan membawa nama MPR. Kami ini masyarakat yang sementara ini mengawal Prabowo-Gibran. Jangan Anda tes kami,” tegasnya.

Bahkan, Fritz mengancam akan mengerahkan massa untuk mengepung kantor pihak yang kembali menyuarakan pemakzulan Gibran.

“Kalau sekali lagi Anda ancam, saya akan turunkan pasukan untuk kepung kantor Anda,” ujarnya.

Pernyataan Fritz tersebut memperlihatkan munculnya respons dari kelompok pendukung Gibran terhadap dinamika Politik dan perdebatan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden.

Di sisi lain, wacana pemakzulan merupakan persoalan ketatanegaraan yang memiliki mekanisme tersendiri.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Muslim Arbi Desak Jokowi Diperiksa dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 13.48 WIB



BANDA ACEH -Bareskrim Polri didesak untuk segera memeriksa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Politik dan hukum, Muslim Arbi mengatakan, pemeriksaan itu dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual yang berada di balik operasi penyadapan tersebut.

"Penyidik Polri harus memeriksa mantan Presiden Jokowi untuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah atau memiliki kepentingan di balik dugaan penyadapan tersebut," kata Muslim kepada RMOL, Rabu, 4 November 2026.

Menurut Muslim yang juga Direktur Gerakan Perubahan ini, penyidik tidak boleh hanya berfokus pada para perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim harus mengungkap secara terang siapa penggagas, pemberi perintah, pelaksana, hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.

"Penyidik juga harus mencari tahu siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, serta untuk kepentingan siapa operasi tersebut dijalankan," ungkapnya.

Muslim turut menyoroti hubungan karier Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dengan Jokowi. Listyo pernah menjabat Kapolresta Surakarta saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Setelah itu, karier Listyo terus menanjak hingga menduduki sejumlah posisi strategis di kepolisian dan menjadi Kapolri pada 2021.

Menurut Muslim, hubungan historis tersebut menjadi salah satu alasan kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu ditelusuri. Meski demikian, ia mengakui kedekatan personal maupun Politik tidak otomatis membuktikan adanya hubungan komando dalam dugaan penyadapan.

"Kedekatan historis tersebut memang tidak otomatis membuktikan adanya hubungan komando dalam dugaan penyadapan. Namun, jika penyidik menemukan bukti komunikasi, instruksi, atau koordinasi dengan pihak di luar kepolisian, informasi tersebut tentu relevan untuk ditelusuri," tegas Muslim.

Desakan itu muncul setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya pada Selasa, 3 November 2026.

Mereka adalah mantan Kapolri yang juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Berdasarkan keterangan Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Penyidik menemukan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dilengkapi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Baru Menjabat, AKBP Rossa Purbo Bekti Dicopot dari Kapolres Bangkalan

Oleh Redaksi · 3 Nov, 18.29 WIB

BANDA ACEH - - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Rossa Purbo Bekti yang belum genap satu bulan menjabat sebagai Kapolres Bangkalan, Jawa Timur. Pencopotan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Pada telegram tersebut, mantan Penyidik KPK tersebut dimutasi menjadi perwira menengah (Pamen) Bareskrim Polri.

Sementara itu, jabatan Kapolres Bangkalan akan dijabat oleh AKBP Mustijat Priyambodo yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Jawa Timur.

Penunjukkan AKBP Rossa Purbo Bekti sebagai Kapolres Bangkalan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Adapun Kapolres yang dimutasi di antaranya:

- Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir menggantikan Kombes Dedi Supriyadi

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Komjen Wahyu Hadiningrat, Wakapolri yang Disebut Pimpin Penangkapan Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 4 Nov, 14.45 WIB



Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat bersama Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin disebut memimpin langsung penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (3/11/2026).

Listyo diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal yang berlangsung pada 2025-2026 ketika dia masih menjabat sebagai Kapolri.

Dalam perkara ini, dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kronologi peristiwa itu diungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Ia menyebut, sebelum Listyo ditetapkan sebagai tersangka, enam perwira Polri berpangkat Irjen dan Kombes lebih dahulu ditangkap.

Menurut Mahfud, keenam perwira tersebut mengaku melakukan penyadapan atas perintah Listyo. Sasaran penyadapan diduga termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Saya mendengar ini bukan tadi pagi (Rabu) tapi kemarin pagi (Selasa) saya sudah mendengar karena penangkapan itu sebenarnya sudah dilakukan pada Minggu malam terhadap enam orang di luar LSP (Listyo Sigit Prabowo) di rumah seorang mantan Kapolri sudah ditangkap tiga irjen dan kombes," kata Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (3/11/2026).

Mahfud mengaku telah mengetahui identitas para perwira yang diamankan. Namun, ia memilih tidak mengungkapkannya ke publik karena masih menunggu perkembangan penanganan perkara di Mabes Polri.

Ia kemudian menyebut keenam perwira tersebut mengungkap pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan.

Setelah itu, Listyo disebut dijemput oleh Wakapolri dan Kabareskrim.

"Dari enam orang itu menyebut bahwa mereka menyadap Presiden dan Seskab. Terus mengaku siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan itu Kapolri (Listyo Sigit Prabowo). Lalu tengah malam dijemput itu LSP. Yang jemput itu Wakapolri dan Kabareskrim," ungkapnya.

Mahfud menambahkan, Listyo sempat dilepaskan sekitar pukul 05.00 WIB pada Selasa dini hari. Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti di balik keputusan tersebut.

Namun, Mahfud menduga pelepasan itu berkaitan dengan ancaman Listyo yang disebut akan membongkar sejumlah rahasia petinggi negara.

Meski demikian, proses hukum di Mabes Polri disebut tetap berlanjut hingga Listyo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

"Sehingga sesudah terjadi pergulatan dari apa yang ditawar dia, ya sudah hadapi saja, (Listyo Sigit) tersangka," tuturnya.

Lantas, seperti apa sosok Komjen Wahyu Hadiningrat? Berikut informasinya.

Profil Wahyu Hadiningrat

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud Ungkit Isu Prabowo Cuma 2 Tahun Jadi Presiden, Singgung Connie Rahakundini

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.29 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkit pernyataan pengamat isu intelijen Connie Rahakundini Bakrie pada 2024 mengenai isu masa jabatan Presiden Prabowo Subianto yang disebut hanya dua tahun. Mahfud menyinggung pernyataan tersebut ketika membahas dugaan motif politik di balik kasus penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon kepala negara.Menurut Mahfud, Connie kala itu pernah menyampaikan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo melalui Rosan Roeslani disebut pernah menyatakan jatah Prabowo menjadi presiden hanya dua tahun. Ia kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan rangkaian dinamika politik yang terjadi setelahnya.

"Ibu Connie dikejar-kejar sampai pergi ke Rusia ngajar lagi. Padahal pergi ngajar lagi karena mau ditangkap, mau apa gitu," tutur Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (4/11/2026).

Mahfud juga menilai pernyataan Connie tersebut patut diperhatikan. Ia menghubungkan isu itu dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi perhatian publik.

Rangkaian peristiwa tersebut, menurut Mahfud, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai posisi Prabowo sebagai presiden. Ia kemudian menyinggung rencana demonstrasi besar-besaran buruh pada 20 Oktober yang disebut akan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan mengepung Istana.

"Nah, yang terakhir kemudian persis 20 Oktober itu ada rencana demo buruh besar-besaran di HI dan mengepung Istana," ujarnya.

Mahfud mengatakan rencana demonstrasi tersebut tercium aparat sehingga dilakukan penyelidikan. Dari proses itu, ia menyebut muncul indikasi adanya tujuan yang lebih besar di balik pengerahan massa.

Dalam skenario yang disampaikan Mahfud, Gibran disebut akan mengambil peran ketika demonstrasi berlangsung. Ia mengungkapkan adanya dugaan skenario bahwa para buruh nantinya diarahkan pulang atas perintah Gibran.

Mahfud menyampaikan rangkaian dugaan tersebut ketika menanggapi kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Ia bahkan menilai tindakan penyadapan terhadap kepala negara memiliki kaitan dengan dugaan upaya makar.

Namun, pernyataan mengenai Connie, rencana demonstrasi, dan skenario yang melibatkan Gibran tersebut merupakan penuturan serta penilaian Mahfud. Bahan yang disampaikan belum memuat bukti independen yang memastikan adanya rencana pengambilalihan kekuasaan.

NASIONAL

Kasus Penyadapan Prabowo: Listyo Sigit Dikenakan Pasal Berlapis, Terancam 10 Tahun Penjara

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.11 WIB

BANDA ACEH - Bareskrim Polri menetapkan tiga orang, yakni Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen (Pol) Ahrie Sonta (ASN), dan Irjen (Pol) Eko Hadi (EH) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk presiden RI, pejabat negara, politikus, tokoh media, organisasi kemasyarakatan, hingga pengusaha.Dalam perkara tersebut, penyidik menjerat ketiga tersangka dengan tiga pasal.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi secara melawan hukum, mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat transimisi elektronik yang tidak bersifat publik dengan ancaman pidana 10 tahun.

“Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perbuatan mengakses komputer atau perangkat elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun,” ujar Kabareskrim Polri Irjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers, Selasa (3/11/2026).

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik tanpa hak dengan ancaman pidana hukuman penjara selama 8 tahun.

“Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan aktivitas tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP),” kata Asep.

Penyadapan itu juga diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penyidik mendalami dugaan penghapusan jejak aktivitas tersebut.

Untuk mengungkap perkara tersebut, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi. Penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Geger Isu Makar Oknum Polisi, Marthinus Hukom: Mantan Pimpinan Polri Catat Sejarah Terburuk Dunia!

Oleh Redaksi · 3 Nov, 18.42 WIB

BANDA ACEH - Pernyataan keras mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom mengenai dugaan makar yang menyeret sejumlah oknum kepolisian menambah panas isu yang tengah mengguncang institusi Polri.

Melalui status WhatsApp, Marthinus melontarkan kritik tajam terhadap kabar dugaan keterlibatan segelintir oknum kepolisian dalam tindakan makar terhadap pemerintah. Pernyataan itu muncul di tengah beredarnya informasi mengenai sejumlah perwira tinggi Polri yang disebut-sebut diamankan.

Marthinus menilai, apabila desas-desus tersebut benar, peristiwa itu akan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah kepolisian dunia.

Bahkan, ia secara terbuka menyindir mantan pimpinan Polri yang tidak disebutkan namanya dalam pernyataan tersebut.

"Dalam sejarah dunia tidak pernah ada Kepolisian melakukan makar terhadap pemerintah. Tapi kalau desas desus hari ini benar benar ADANYA, yang katanya ada segelincir oknum kepolisian melakukan makar, maka Anda sebagai mantan pemimpin Polri telah merubah sejarah dunia. Dengan demikian semua prestasi anda adalah prestasi nomor satu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Viral Lagi: Ramalan Hard Gumay soal Upaya Kudeta terhadap Prabowo, Dalangnya Orang Tinggi Kurus

Oleh Redaksi · 4 Nov, 12.19 WIB



BANDA ACEH – Potongan video ramalan Hard Gumay tentang kemungkinan adanya upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali ramai beredar di media sosial. Parapsikolog asal Palembang itu menyebut ada sosok yang sudah merencanakan untuk merebut posisi presiden, meski ujung-ujungnya tidak akan berhasil.Dalam cuplikan yang dikutip dari berbagai akun, Hard Gumay mengatakan, “Ada orang yang mau mencoba kudeta, walaupun ujung-ujungnya enggak berhasil. Tapi dia sudah merencanakan itu, sudah memikirkan itu, dan nanti dilakukan sama dia.” Ia menambahkan bahwa oknum tersebut akan bergerak dengan menghasut, mengajak, dan merangkul berbagai pihak dari berbagai sisi. “Dia mengajak sana mengajak sini, menghasut sana menghasut sini. Dia ngerangkul sana ngerangkul sini. Tapi tidak berhasil,” ujarnya.

Ciri-ciri Sosok dalam Ramalan

Yang paling menarik perhatian publik adalah deskripsi fisik dan latar belakang sosok yang dimaksud Hard Gumay. Menurut penerawangannya, pelaku tersebut adalah pria berperawakan tinggi dan kurus, berkulit kuning langsat (putih nggak, hitam nggak), dengan potongan rambut pendek cepak.

Sosok ini disebut pernah menduduki jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan dan berada di lingkaran (circle) Politik terdekat di sekeliling Presiden Prabowo. Namun, bukan bagian dari keluarga maupun tim inti. “Sorang sosok, yang ketangkap sama gue orangnya kurus, kuning langsat, putih ngga hitam ngga, rambut pendek cepak, pernah punya jabatan tinggi di pemerintahan. Terdekat, orang sekeliling bapak, circle bapak juga, tinggi orangnya,” papar Hard Gumay dalam wawancara lama yang kini kembali viral.

Ancaman yang Sudah Direncanakan Matang

Hard Gumay menekankan bahwa ancaman ini bukan sekadar spekulasi kosong. Oknum tersebut digambarkan sudah menyusun strategi dengan perhitungan matang dan akan bergerak diam-diam. Meski begitu, ia berulang kali menegaskan bahwa upaya tersebut pada akhirnya akan gagal dan bisa diatasi.

Ramalan ini pertama kali dilontarkan Hard Gumay sekitar Mei 2024 di kanal YouTube Macan Idealis, tak lama setelah Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih. Saat itu ia juga mengingatkan agar Presiden Prabowo berhati-hati dengan orang-orang terdekat yang mungkin memiliki niat tersembunyi.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Hard Gumay terkait video yang kembali beredar, dan ramalan tersebut tetap bersifat spekulatif. Publik diimbau untuk menyikapinya secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terbukti secara fakta.

NASIONAL

Yusril Buka Suara soal Kabar Penangkapan Sejumlah Jenderal Polri terkait Isu Penyadapan

Oleh Redaksi · 3 Nov, 18.34 WIB

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait kabar penangkapan sejumlah jenderal Polri yang beredar di media sosial. Kabar tersebut dikaitkan dengan isu penyadapan.

Yusril mengaku belum mengetahui kebenaran informasi yang ramai dibicarakan tersebut. Dia menegaskan belum menerima konfirmasi resmi mengenai kabar pengamanan sejumlah jenderal polisi dan meminta masyarakat menunggu penjelasan dari pihak yang berwenang.

"Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu," kata Yusril kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Tanah Abang, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dia meminta masyarakat bersabar menunggu keterangan dari pejabat pemerintah yang berkompeten mengenai kabar tersebut.

"Mohon bersabar, barangkali nanti ada pihak yang berkompeten di kalangan pemerintah untuk menjawab dan menjelaskan persoalan ini," ujarnya.

Yusril juga mengaku belum mengetahui kebenaran kabar yang mengaitkan isu penyadapan tersebut dengan percakapan antara Presiden dan Kapolri. Dia kembali menegaskan masih menunggu penjelasan resmi dari pejabat yang memiliki otoritas.

"Saya juga belum tahu apa yang terjadi. Jadi nanti kita akan tunggu saja. Barangkali nanti akan ada penjelasan resmi soal itu dari pejabat yang memang punya otoritas untuk menjelaskannya," tuturnya.

Dia mengatakan, informasi yang diterimanya sejauh ini tidak berbeda dengan kabar yang beredar di masyarakat. Yusril mengaku hanya mengetahui isu tersebut dari media sosial.

"Saya pun sama seperti Anda, mendengar kabar itu, membaca juga di media sosial. Belum dapat memastikan apa-apa tentang apa yang sebetulnya terjadi," katanya.

Saat ditanya apakah sudah ada penjelasan dari Mabes Polri mengenai pihak-pihak yang dikabarkan diamankan, Yusril kembali mengatakan belum mengetahuinya.

"Belum, belum. Entahlah kalau sudah ada sekarang. Karena saya ada di dalam 21 jam, tidak ikuti perkembangan," ucapnya.

Yusril juga memastikan belum ada komunikasi dari Presiden kepada Kementerian Koordinator Kumham Imipas untuk mendalami isu tersebut.

"Belum, sama sekali," katanya.

Sebelumnya, beredar kabar mengenai penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri yang dikaitkan dengan isu penyadapan percakapan Presiden dan Kapolri. Bahkan, salah satu sosok yang dikabarkan diamankan disebut-sebut merupakan jenderal polisi berbintang empat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

TNI AL Kerahkan 20.980 Personel Perkuat Pengamanan Ibu Kota, Usai Eks Kapolri Listyo Sigit Ditahan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 11.32 WIB



BANDA ACEH – Dinamika keamanan nasional mendadak memanas menyusul langkah strategis yang diambil institusi militer dan penegak hukum secara bersamaan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) resmi mengerahkan kekuatan masif sejumlah 20.980 personel guna memperkuat sektor pengamanan di wilayah DKI Jakarta.Pengerahan pasukan skala besar ini dikonsolidasikan tak lama setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dalam skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta para pejabat negara.

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL), Yayan Sofiyan, memaparkan bahwa pergeseran ribuan prajurit tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui surat telegram resmi. Seluruh elemen pasukan yang diterjunkan nantinya akan berada di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya.

“Pengerahan pasukan ini merupakan rencana penebalan pengamanan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta,” ujar Yayan di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Operasi pergeseran pasukan ini dibagi secara terstruktur ke dalam empat tahapan berbeda. Tahap pertama telah dimulai sejak 2 November 2026 dengan mengerahkan 2.100 personel dari satuan eksisting di Jakarta, meliputi unsur Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, serta Kolinlamil.

Selanjutnya, pada 4 November 2026, tahapan kedua dan ketiga menyusul dengan menerjunkan 5.740 personel dari luar Jakarta, yang dimobilisasi memanfaatkan armada Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) serta jalur darat dari berbagai pangkalan strategis seperti Koarmada II, Pasmar 2, Puspenerbal, Kodiklatal, AAL, hingga basis TNI AL di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Adapun pada tahap keempat, sebanyak 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta disiagakan penuh di markas masing-masing guna mengantisipasi eskalasi kebutuhan pengerahan lanjutan sewaktu-waktu.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, turut menegaskan bahwa pengerahan prajurit dalam jumlah signifikan tersebut merupakan wujud nyata kesiapsiagaan militer dalam menjalankan mandat konstitusional menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” tutur Nas.

Di sisi lain, situasi hukum di korps Bhayangkara bergulir kian cepat. Bareskrim Polri resmi menahan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua jenderal lainnya, yakni Kadivkum Mabes Polri Irjen …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Irjen Eko Hadi Santoso: Kini Terseret Isu Operasi Internal Polri Bersama Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 3 Nov, 17.03 WIB

BANDA ACEH – Nama Irjen Pol Eko Hadi Santoso kembali menjadi sorotan publik.

Perwira tinggi lulusan Akpol 1999 yang sebelumnya dikenal sebagai reserse anti-teror lalu berprestasi membongkar sejumlah kasus narkoba besar ini kini disebut dalam isu operasi internal Polri yang juga menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Irjen Eko Hadi Santoso merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang angkatan ke-4 (lulus 1996) dan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999, Batalyon Endra Dharmalaksana.

Ia menjadi salah satu perwira angkatan 1999 yang cepat “pecah bintang”.

Jejak jabatannya meliputi:

• Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya (2015)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolri Makin Ngendus Pergerakan LSP Saat Kerahkan Demo Buruh Agar Menampilkan Gibran jadi Pahlawan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.32 WIB



Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang mengenakan seragam dinas lengkap tampak sedang memberikan pernyataan. Di sampingnya berdiri Said Iqbal dengan kemeja oranye dan seorang pria lain dengan kemeja putih dengan latar belakang putih polos. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti pasal-pasal yang dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, Mahfud turut mempertanyakan kemungkinan adanya unsur makar di balik perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mahfud menyebut sejumlah ketentuan hukum yang menurutnya berkaitan dengan perkara tersebut, antara lain Pasal 208 dan Pasal 332 KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurutnya, unsur makar belum terlihat dari pasal-pasal yang disebutkan dan perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Meski demikian, ia menilai tujuan di balik dugaan penyadapan perlu ditelusuri lebih jauh.

“Tujuannya memang agak-agak makar,” ujar Mahfud.

Mahfud Singgung Pernyataan Connie dan Budi Arie

Mahfud kemudian mengaitkan kasus tersebut dengan sejumlah dinamika politik yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Ia menyinggung pernyataan akademisi Connie Rahakundini Bakrie pada 2024 yang pernah menyampaikan klaim bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan jatah masa jabatan dua tahun kepada Prabowo Subianto.

“Sehabis itu, muncul rentetan kejadian lain,” tambahnya.

Mahfud juga menghubungkan polemik ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan dugaan adanya pematangan rencana politik tertentu.

Selain itu, ia menyinggung pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang pernah menyampaikan bahwa masa pemerintahan Prabowo tidak akan berlangsung hingga 2029.

Menurut Mahfud, rangkaian peristiwa tersebut perlu dicermati dalam melihat perkembangan situasi politik nasional.

Mahfud turut menyoroti rencana demonstrasi besar-besaran buruh di Istana pada 20 Oktober 2026 lalu.

Ia menyebut adanya informasi mengenai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani aksi tersebut.

Mahfud mempertanyakan tujuan di balik skenario penanganan demonstrasi yang menurutnya perlu ditelusuri.

"Sekarang sudah ada pematangan lah, persis 20 Oktober rencana demo buruh besar-besaran di Istana, dan Kapolri Suyudi Ario Seto tahu, demo buruh nanti yang ngatasi Gibran Rakabuming Raka, jadi seolah-olah yang ngatasi Gibran. Buruh akan pulang atas perintah Gibran, akhirnya dilacak ini tujuannya apa?” ungkapnya.

NASIONAL

Menghilang Usai Listyo Sigit Ditangkap, Seskab Teddy Dituding Ikut Khianati Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 14.54 WIB



Teddy Indra Wijaya saat bersama Joko Widodo alias Jokowi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Penangkapan Listyo Sigit Prabowo atas kasus penyadapan ponsel Presiden Prabowo Subianto turut serta membawa nama Seskab Teddy.

Seskab Teddy yang menghilang usai penangkapan Mantan Kapolri tersebut disebut-sebut ikut serta terlibat.

Terlebih lagi belakangan ini narasi pergantian Seskab Teddy marak terdengar dan dikaitkaitkan dengan penyadapan presiden.

Orang kepercayaan Presiden Prabowo tersebut diisukan akan diganti oleh rekannya sendiri yakni Kapten Dali Darulqutni.

Namun isi tersebut belum terbukti kebenarannya karena hingga detik ini belum adanya pernyataan resmi dari pemerintahan.

Listyo Sigit sendiri menjadi tersangka bersama dua jendral lainnya dan kini telah ditangkap.

Aksi penyadapan yang dilakukannya telah berlangsung sejak 2025 dan pada Oktober 2026 ia menghapus file jejak penyadapannya untuk memnghilangkan barang bukti.

Adapun target penyadapan selain presiden juga diduga menyasar sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh Politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, LSM dan pengusaha.

Menurut penyidik, diduga tersangka memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Modusnya, sejumlah nomor telepon tersebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Sementara menurut aturan penyadapan seharusnya dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan hukum.

Adapun dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Pada Oktober 2026 penyidik menduga ada perintah untuk menghapus file hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.

Adapun barang bukti dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa sepuluh orang saksi tiga orang saksi ahli.

Sementara barang bukti yang disita meliputi 11 unit handphone, 1 unit iPad dan 4 buah flashdisk.

Para tersangka terancam hukuman:

• Pasal 258 UU No. 1/2023 (KUHP) dengan dugaan tindak pidana Penyadapan atau intersepsi transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum dan ancaman penjara maksimal 10 tahun.

• Pasal 332 ayat 1 dan atau 2 KUHP dugaan tindak pidana Mengakses komputer atau sistem milik orang lain tanpa gak dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. ***

NASIONAL

Status WA Eks Kepala BNN Singgung Polisi Makar, di Tengah Isu Penangkapan Jenderal Sadap Presiden

Oleh Redaksi · 3 Nov, 17.17 WIB

BANDA ACEH - Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Martinus Hukom, melontarkan kritik keras di tengah beredarnya isu dugaan makar yang disebut menyeret sejumlah oknum kepolisian.

Sorotan Martinus tertuju pada kabar penangkapan sejumlah jenderal polisi yang ramai diperbincangkan.

Melalui status WhatsApp, Martinus menyinggung kemungkinan adanya oknum kepolisian yang terlibat dalam dugaan makar terhadap pemerintah.

Ia bahkan menyebut, jika kabar tersebut benar, peristiwa itu akan menjadi catatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah kepolisian dunia.

Tak hanya itu, Martinus juga melontarkan kritik tajam terhadap seorang mantan pimpinan Polri yang tidak disebutkan namanya.

Dalam pernyataannya, ia menilai mantan pimpinan tersebut akan mencatatkan sejarah buruk apabila dugaan keterlibatan oknum polisi dalam makar terbukti.

"Dalam sejarah dunia tidak pernah ada Kepolisian melakukan makar terhadap pemerintah. Tapi kalau desas desus hari ini benar benar ADANYA, yang katanya ada segelincir oknum kepolisian melakukan makar, maka Anda sebagai mantan pemimpin Polri telah merubah sejarah dunia," tulis Martinus.

Ia kemudian melanjutkan kritiknya dengan menyebut sejumlah istilah keras terhadap rekam jejak mantan pimpinan Polri tersebut.

"Dengan demikian semua prestasi anda adalah prestasi nomor satu. Terkorup, terjelek, terusak dan terakhir adalah mencatat untuk pertama kalinya melakukan MAKAR," lanjutnya.

Pernyataan Martinus disampaikan dengan kalimat bersyarat. Ia menekankan kritik tersebut berkaitan dengan kabar yang beredar mengenai dugaan keterlibatan sejumlah oknum kepolisian dalam tindakan makar.

Hingga saat ini, pernyataan tersebut merupakan pandangan Martinus terhadap isu yang berkembang.

Belum ada informasi dalam pernyataan tersebut yang dapat memastikan kebenaran dugaan makar maupun keterlibatan anggota kepolisian.

Markas Besar (Mabes) Polri akan mengecek kabar sejumlah perwira tinggi kepolisian yang disebut diamankan terkait pengerahan massa di Yogyakarta.

Pemeriksaan informasi tersebut akan dilakukan melalui proses evaluasi terhadap kegiatan pengamanan dan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, evaluasi merupakan bagian dari prosedur yang dilakukan setelah kepolisian menjalankan tugas pengamanan aksi.

"Tadi yang disampaikan nanti kami akan cek, karena selalu ada bagian kemudian proses evaluasi," kata Johnny usai Syukuran Hari …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Mualem Silaturahmi dengan Kapolri, Apresiasi Pemberantasan Narkoba di Aceh

Oleh Redaksi · 3 Nov, 22.11 WIB

JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melakukan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, di kediaman Kapolri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Irsyadi. Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh.

Sejumlah hal strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya keberlanjutan perdamaian Aceh, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta upaya bersama dalam menjaga kondisi Aceh agar tetap aman, damai, dan kondusif.

Pada kesempatan itu, Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri atas langkah penindakan terhadap kasus narkoba di Aceh. Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Polri dalam melakukan penindakan terhadap peredaran narkoba di Aceh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit cs Sadap Presiden Prabowo, Gerindra:Pengkhianat!

Oleh Redaksi · 4 Nov, 11.16 WIB



BANDA ACEH -Partai Gerindra meminta Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Gerindra menilai pengusutan perlu dilakukan hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi otak di balik aksi tersebut.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso mengatakan, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut keamanan informasi dan stabilitas pemerintahan.

"Tindakan menyadap presiden bukan lagi sekadar kejahatan siber atau pelanggaran etik, melainkan tindakan sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Siapa pun yang bermain di belakang layar, apa pun jabatannya dan seberapa besar kekuatannya harus diseret ke muka hukum," kata Sugiat dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Sugiat yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR mengapresiasi langkah Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia menilai penanganan perkara itu menunjukkan komitmen penegakan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

"Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung penuh ketegasan Kapolri beserta jajaran Mabes Polri yaitu Bareskrim dan Divisi Propam yang menindak tegas siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun institusi," ujarnya.

Dia meminta penyidikan tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan penyadapan secara langsung. Menurut dia, Bareskrim Polri perlu menelusuri kemungkinan pihak lain yang memberikan perintah, menggerakkan atau mendanai tindakan tersebut.

"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," kata dia.

Menurut Sugiat, pengusutan kasus ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem keamanan informasi dan pengawasan internal, khususnya di lingkungan pengamanan presiden dan intelijen negara. Dia meminta pemeriksaan terhadap personel yang berada di lingkaran terdekat presiden dilakukan secara ketat guna memastikan keamanan informasi dan mencegah kejadian serupa.

"Peristiwa ini harus memicu pembersihan menyeluruh di ring pengamanan dan intelijen negara. Perlu ada pemeriksaan ulang loyalitas secara ketat terhadap seluruh personel di lingkaran terdekat Presiden untuk memastikan tidak ada lagi 'duri dalam daging'," katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal (illegal access).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

KOMUNITAS

Pj Keuchik Pulo Bunta Fasilitasi Tim USM Peroleh Hibah Kemdiktisaintek untuk Gampong Meunasah Tuha

Oleh Hamdani · 3 Nov, 21.54 WIB

JANTHO - Pj Keuchik Pulo Bunta, Rusydi SAg MPd memfasilitasi Tim Universitas Serambi Mekkah (USM) dalam proses untuk memperoleh dan hibah dari Kemdiktisaintek untuk Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada.

Hal itu disampaikan Rusydi disela penanda tanganan MOA dan IA dengan FKIP, FKM, dan F Teknik USM, Selasa (3/11/2026) di Aula UDKP Kecamatan Peukan Bada.

"Proses untuk mendapatkan dana hibah tersebut sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu bersama dosen FKM USM, Burhanuddin Syam dan alhamdulillah sudah disetunjui oleh Kemendiktisaintek, "kata Rusydi yang juga selaku Sekcam Peukan Bada ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor IV, Dr Jalaluddin MPd menyampaikan kabar baik terkait keberhasilan tim Universitas Serambi Mekkah memperoleh hibah Program Mahasiswa Berdampak – Aksara Peduli Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), melalui program berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kesiapsiagaan Kesehatan Menghadapi Gempa Bumi dan Tsunami melalui Inovasi Edukasi dan Simulasi Berbasis Komunitas di Gampong Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.”

Program ini merupakan salah satu wujud konkret implementasi kerja sama antara Universitas Serambi Mekkah dan Pemerintah Kecamatan Peukan Bada.

"Kegiatan tersebut diinisiasi oleh tim kolaborasi lintas fakultas yang melibatkan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah bersama Sekcam Peukan Bada, "kata Jalaluddin.

Keberhasilan memperoleh pendanaan hibah tersebut menjadi momentum penting bagi USM untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang hadir langsung di tengah masyarakat. Melalui Program Mahasiswa Berdampak – Aksara Peduli, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman pembelajaran di luar kampus, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, menerapkan inovasi, dan mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan.

Program ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif dan multidisiplin yang mengintegrasikan keilmuan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan teknik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan inovasi dan solusi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tingkat gampong.

Pelaksanaan program ini juga menjadi bukti bahwa kerja sama MoA dan IA tidak berhenti pada dokumen kesepakatan, tetapi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diam-diam Nusron Wahid Datang ke KPK Tanpa Penjadwalan Pemeriksaan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 10.58 WIB



BANDA ACEH -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Rabu, 4 November 2026.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Nusron tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan sekitar pukul 09.22 WIB. Saat ini, Nusron masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

"Benar, hari ini NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya. Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 4 November 2026.

Budi menjelaskan, kehadiran Nusron merupakan tindak lanjut dari panggilan pemeriksaan yang sebelumnya telah disampaikan penyidik.

"Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. NW hadir sekitar pukul 09.22 WIB," pungkas Budi.

Kedatangan Nusron ke KPK luput dari pantauan wartawan. Mengingat sehari sebelumnya, Selasa, 3 November 2026, Budi menyatakan belum ada agenda pemeriksaan terhadap Nusron saat ditanya kabar Nusron diperiksa hari ini.

"Belum ada," singkat Budi.

Sebelumnya, KPK telah dua kali menjadwalkan pemeriksaan Nusron sebagai saksi. Pada pemanggilan pertama, Nusron menyampaikan tidak dapat hadir karena memiliki agenda di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Setelah dijadwalkan ulang, Nusron kembali tidak hadir dengan alasan memiliki kegiatan di luar negeri.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto sebelumnya menyatakan surat panggilan kedua telah diterbitkan. Ia berharap Nusron dapat segera memenuhi panggilan penyidik tanpa harus dilakukan upaya paksa.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

KOMUNITAS

Gampong Sentosa Santuni 18 Anak Yatim dan Piatu, Dana Terkumpul Capai Rp84,24 Juta

Oleh Hamdani · 3 Nov, 22.06 WIB

PIDIE – Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap anak yatim dan piatu ditunjukkan masyarakat Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dengan kegiatan santunan, masyarakat berhasil menghimpun dana sebesar Rp84.240.000 untuk membantu 18 anak yatim dan piatu.

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (1/11/2026) di meunasah Gampong Sentosa tersebut dihadiri perangkat gampong, tokoh masyarakat, warga, serta para penerima santunan.

Dana yang terkumpul merupakan hasil partisipasi dan sumbangan berbagai pihak, termasuk kontribusi para diaspora atau warga asal Gampong Sentosa yang kini menetap dan bekerja di berbagai daerah di perantauan.

Setiap anak menerima santunan uang tunai sebesar Rp4.680.000. Selain itu, masing-masing penerima juga mendapatkan paket kebutuhan pokok …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Alat Sadap Listyo Lebih Canggih dari Milik TNI, Ini Penjelasan Mantan Kepala BAIS

Oleh Redaksi · 4 Nov, 11.01 WIB



BANDA ACEH — Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman Ponto menilai alat penyadapan yang dimiliki Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo lebih canggih dari milik TNI atau setidaknya memiliki kemampuan yang setara. Penilaian tersebut disampaikan Soleman menyusul terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit bersama dua jenderal polisi sebagai tersangka.Menurut Soleman, kecanggihan alat penyadapan tersebut terlihat dari kemampuannya untuk dibawa ke berbagai lokasi. Ia juga menyoroti informasi bahwa penyadapan dilakukan di rumah salah satu tersangka. "Iya, lebih canggih dari milik TNI, atau minimal setara," kata Soleman dalam wawancara eksklusif dengan Afu.id di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Soleman mengatakan, sejak pembahasan undang-undang yang mengatur penyadapan oleh Polri, ia telah mengingatkan agar kepolisian tidak memiliki alat penyadapan dengan kemampuan terlalu canggih. Menurut dia, kebutuhan penyadapan Polri berbeda dengan TNI. Polri berhadapan dengan persoalan hukum di kalangan masyarakat sipil, sedangkan TNI memiliki tugas menghadapi ancaman dari negara lain. "Saya sudah ingatkan dulu saat pembuatan UU penyadapan Polri. Kata saya, Polri tidak perlu punya alat secanggih itu karena hanya untuk menyadap sipil. Sedangkan TNI musuhnya adalah negara lain," sambung Soleman.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui adanya dugaan penyadapan tanpa prosedur melaporkannya kepada Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026, ketika Listyo Sigit masih menjabat Kapolri.

Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Asep menyebut para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan. "Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh Politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha," kata Asep.

Selain dugaan penyadapan, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil sadapan pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolri Terlama yang Sukses Tanam Jagung jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Mahfud MD: Gila!

Oleh Redaksi · 4 Nov, 11.05 WIB



BANDA ACEH -Kritik pedas dilontarkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD, menyusul penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Mahfud mengaku tak habis pikir jika Listyo Sigit melakukan dugaan penyadapan terhadap RI-1. Pasalnya, Listyo Sigit menjabat Kapolri terlama dan pernah menyabet penghargaan Bintang Mahaputera serta pujian Presiden Prabowo karena dinilai mampu mengerahkan jajaran Polri untuk menanam jagung.

Bahkan, pimpinan Komisi III DPR pernah menyebut Listyo sebagai polisi terbaik sepanjang sejarah. Namun, kini namanya justru terjerat kasus dugaan kejahatan penyadapan terhadap kepala negara sendiri.

"Listyo Sigit, Kapolri terlama, pernah mendapat bintang mahaputra, dipuji oleh Presiden karena bisa mengerahkan POLRI menanam jagung, bahkan oleh pimpinan Komisi III disebut polisi terbaik sepanjang sejarah ternyata jadi TSK sebagai pelaku kejahatan terjahat di sepanjang sejarah POLRI yakni menyadap kepala negaranya sendiri. Gilaaaa," kata Mahfud melalui akun media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal Twitter @mohmahfudmd, dikutip Rabu, 4 November 2026.

Mahfud juga menilai Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah kasus sebetulnya bisa menunjukkan ketegasan terhadap orang-orang yang sebelumnya mendapat kepercayaan dan pujian darinya.

Ia mencontohkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang sebelumnya kerap dibela dan dipuji Presiden, tetapi akhirnya harus menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Mahfud turut menyinggung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, yang disebutnya sebagai algojo koruptor sekaligus orang kepercayaan Prabowo, tetapi kemudian juga menghadapi proses hukum atas dakwaan korupsi.

"Jadi jangan keterlaluan berkorupsiria dan melakukan pengkhianatan, misalnya karena merasa sok dekat dengan Presiden Prabowo. Kalau Anda keterlaluan, ditindak tegas juga kan?" kata Mahfud.

Atas dasar itu, Mahfud pun meminta Presiden Prabowo semakin menunjukkan ketegasan dalam menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.

"Ayo, Pak Presiden, gembirakan rakyat dengan ketegasan yang lebih banyak lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) pada Selasa, 3 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

PC PERTI Aceh Besar: Beut Kitab Bak Sikula Sah Secara Hukum, Jangan Giring Opini Sesat

Oleh Redaksi · 3 Nov, 23.58 WIB

ACEH BESAR – Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PC PERTI) Kabupaten Aceh Besar, Tgk. Fauzal Fikra, membantah keras narasi pemberitaan yang menyoroti program Beut Kitab Bak Sikula seolah-olah tidak memiliki dasar hukum dan menggganggu jam belajar siswa.

Menurutnya, pemberitaan tersebut tendensius, tidak memahami kekhususan Aceh, dan berpotensi melemahkan upaya penguatan syariat Islam di Aceh melalui sekolah.

“Kami dari organisasi Islam PERTI Aceh Besar sangat mendukung penuh dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Aceh Besar atas program Beut Kitab Bak Sikula. Ini program visioner, berani, dan sesuai dengan jati diri Aceh sebagai daerah bersyariat. Dasar hukum program ini sangat kuat dan berlapis,” tegas alumni Magister Hukum Institut Nahdlatul Ulama (ISNU) Aceh ini ke awak Media, di Aceh Besar, Selasa (3/11/2026).

Ia menyebutkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125 ayat (1) dan (2) yang menegaskan pelaksanaan syariat Islam di Aceh termasuk bidang pendidikan. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Islami.

Instruksi Bupati dan Petunjuk Teknis Dinas Pendidikan yang sah sebagai instrumen kebijakan afirmatif. Tidak semua program harus dengan Perbup. Keputusan Bupati dan SE Kepala Dinas adalah sah secara hukum administrasi.

Fauzal meminta jangan dibolak-balik fakta hukum. Aceh ini punya kekhususan, jangan samakan dengan daerah lain. Justru aneh bin sesat kalau ada manusia yang alergi dengan pendidikan agama di Aceh, apalagi yg menggiring opini sesat ini orang Aceh sendiri.

“Yah Aceh, Ma Aceh, lahee di Aceh ke progam beut bak sikula beungeh, payah ta tanyoeng bijeh panee nyan?” tutur Abon Beutong dengan nada tinggi.

Fauzal meminta Bupati Aceh Besar tidak ragu dan tidak mundur selangkah pun dalam melanjutkan program Beut Kitab Bak Sikula. Evaluasi boleh, transparansi anggaran harus, tapi jangan sampai evaluasi dijadikan alat untuk menghentikan program baik dan mulia ini.

“Kami, PC PERTI Aceh Besar bersama seluruh organiasi Islam, alumnus pesantren/dayah, siap berdiri di garda terdepan mendukung program Beut Kitab Bak Sikula. Ini bukan sekadar program. Ini adalah pelaksanaan syariat Islam yang menjadi amanah undang-undang dan aspirasi rakyat Aceh. Lanjutkan Pak Bupati!” pungkas Fauzal.[]

ACEH

Wagub Aceh Dampingi Mendagri Tinjau Dampak Bencana Banjir di Pidie Jaya

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.47 WIB

PIDIE JAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian, dalam kunjungan kerja meninjau kondisi pascabencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (3/11/2026).

Kunjungan tersebut diawali dengan kegiatan konferensi pers serta penyerahan bantuan secara simbolis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial di Pendopo Bupati Pidie Jaya.

Selanjutnya, Mendagri bersama Wagub Aceh dan rombongan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir untuk melihat langsung kondisi infrastruktur serta kerusakan yang dialami masyarakat.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril Belum Bisa Pastikan Gibran Juga Jadi Sasaran Penyadapan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 09.27 WIB



BANDA ACEH — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, belum dapat memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh para tersangka Mabes Polri.

Yusril mengaku, baru menerima informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat serta politisi. Pemerintah masih menunggu hasil penyidikan Bareskrim Polri untuk memastikan siapa saja yang menjadi target penyadapan.

"Wallahu a'lam bish-shawab. Yang baru saya dengar adalah bahwa Presiden dan sejumlah menteri dan sejumlah politisi. Jadi saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak," kata Yusril dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Trinity Tower, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.

Yusril mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Bareskrim Polri, praktik penyadapan ilegal tersebut diduga telah berlangsung sejak Januari 2025. Artinya, aktivitas itu mulai berjalan sekitar dua bulan setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

"Mulai bulan Januari sampai sekarang proses penyadapan itu masih berlangsung sampai dilakukan pelaporan dan kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ujarnya.

Meski menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat, Yusril belum bersedia mengungkap identitas pelapor maupun detail lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penyadapan.

Yusril juga meminta publik tidak mendesak pengungkapan identitas pelapor. Menurutnya, pelapor memiliki perlindungan hukum karena nantinya akan diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan.

"Ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan pelapor. Orang yang melapor itu kan akan diperiksa sebagai saksi, jadi tolong jangan Anda tanyakan hal itu," katanya.

Di tengah belum terungkapnya target, lokasi, dan perangkat yang digunakan, Yusril memastikan pemerintah mengawal aspek hukum penanganan perkara tersebut.

Yusril juga menegaskan, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Tugas saya menjelaskan aspek hukumnya, bahwa telah dilakukan penetapan tersangka, dilakukan penahanan, KUHAP telah dipenuhi. Pasal-pasal dari KUHP dan Undang-Undang ITE digunakan," ujarnya.

Namun, Yusril menegaskan pengungkapan barang bukti, perangkat penyadapan, hingga konstruksi teknis kejahatan bukan menjadi kewenangan kementerian-nya.

"Itu wewenang penyidik untuk menjelaskan, bukan wewenang kami," pungkasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

SBY Respons Eks Kapolri Listyo cs Tersangka Penyadapan Presiden: Kok Jadi Begini Negara Kita?

Oleh Redaksi · 4 Nov, 11.09 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Politik dalam negeri menyusul penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal Polri lain sebagai tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh masyarakat. Dia menilai politik dalam negeri semakin liar.

Menurut dia, berbagai cara seolah dibenarkan untuk mendapatkan kekuasaan, tanpa mempertimbangkan baik dan buruk mau pun nilai moral.

"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri," ujar SBY melalui akun X @SBYudhoyono, Rabu (4/11/2026).

SBY mengaku mencintai Indonesia dan meyakini seluruh warga negara juga memiliki kecintaan yang sama terhadap Tanah Air. Karena itu, dia meminta Prabowo menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.

"Saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini," kata SBY.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep, Selasa (3/11/2026) malam.

Selain Prabowo, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Atas perbuatannya, ketiga jenderal polisi itu dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun

EDUKASI

Olah Daun Kari Jadi Bumbu Tabur Instan, Tim PPG USK Raih Juara II Terbaik Gelar Karya Projek Kepemimpinan

Oleh Hamdani · 3 Nov, 21.42 WIB

BANDA ACEH – Inovasi pengolahan daun kari menjadi bumbu tabur instan mengantarkan Tim Seni Budaya dan Kuliner Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Syiah Kuala (USK) meraih Juara II Terbaik dalam Gelar Karya Projek Kepemimpinan PPG USK, Senin (2/11/2026).

Tim tersebut berhasil meraih posisi kedua terbaik dari 12 tim peserta melalui proyek bertajuk “Inovasi Pengolahan Daun Kari Menjadi Bumbu Tabur Instan, Praktis dan Bernilai Ekonomis”. Hasil karya itu dipamerkan di Lantai 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) USK, Banda Aceh.

Inovasi ini berangkat dari upaya mengoptimalkan potensi bahan lokal, khususnya daun kari yang selama ini lebih dikenal sebagai bahan pelengkap masakan tradisional. Melalui proses pengolahan dan pengembangan produk, daun kari diolah menjadi bumbu tabur instan yang praktis, memiliki cita rasa khas, serta berpotensi menjadi alternatif penyedap dan pelengkap berbagai jenis makanan.

Tidak hanya berorientasi pada pengembangan produk, proyek ini juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan demonstrasi pengolahan daun kari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 26 September 2026 dengan melibatkan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tanjong Deah, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam kegiatan itu, tim memperkenalkan potensi daun kari sebagai bahan baku inovasi kuliner sekaligus memperagakan tahapan pengolahannya menjadi bumbu tabur instan. Antusiasme peserta terlihat dari ketertarikan mereka terhadap proses pembuatan dan peluang pemanfaatan bahan lokal yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Respons positif masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa inovasi tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain memberikan alternatif pemanfaatan bahan pangan lokal, produk ini juga membuka peluang usaha baru yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Ketua PPG Universitas Syiah Kuala, Drs. Abu Bakar, M.Si., berharap inovasi bumbu tabur instan berbahan daun kari tersebut tidak berhenti pada kegiatan gelar karya. Menurutnya, produk ini perlu terus dikembangkan, terutama dari sisi kualitas, kemasan, standardisasi produksi, dan strategi pemasaran agar mampu bersaing serta berpeluang menjadi produk unggulan berbasis kearifan lokal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Wakil Bupati Aceh Barat: Miconis 2026, Perkuat Kajian Islam di Era Digital

Oleh Aceh Barat · 3 Nov, 16.43 WIB

MEULABOH - Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil membuka Third Meulaboh International Conference on Islamic Studies (Miconis) 2026 di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Selasa (3/11/2026).

Said mengatakan, tema Miconis 2026, Islamic Studies for Global Transformation: Knowledge, Justice, Sustainability, and Digital Civilization, relevan dengan tantangan era digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, transformasi digital menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Namun, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan inovasi.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah,” kata Said.

Ia menegaskan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus tetap berlandaskan nilai-nilai agama. Di Aceh Barat, pembangunan perlu berjalan seiring dengan penguatan syariat Islam, pembentukan akhlak, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Said berharap Miconis 2026 menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat, dan pembangunan daerah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud Ungkap Hasil Sadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Diduga Mengalir ke Solo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 08.48 WIB



BANDA ACEH –- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah petinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Dalam perbincangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (3/11/2026), Mahfud menilai kasus tersebut sangat serius karena objek penyadapan yang dipersoalkan adalah kepala negara.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih besar di balik dugaan tindakan tersebut.

Salah satu hal yang disorot Mahfud adalah informasi yang didengarnya mengenai hasil penyadapan.

Mahfud menyebut, produk akhir dari penyadapan itu diduga mengalir hingga ke Solo.

"Kenapa orang kemudian bicara soal makar? Karena dari hasil, taruhlah bocoran itu, produk dari hasil penyadapan ini, produk finalnya, itu sampai ke Solo," kata Mahfud dalam podcast tersebut.

Mahfud menjelaskan, informasi yang didengarnya mengarah pada dugaan bahwa hasil penyadapan tidak berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi juga dianalisis untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan terhadap pihak tertentu.

Menurut dia, dugaan mengenai aliran hasil penyadapan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Ia menyebut bagaimana informasi itu digunakan dan siapa saja yang terlibat akan terungkap melalui proses persidangan.

Mahfud Singgung Dugaan Makar

Mahfud juga mengaitkan kasus penyadapan tersebut dengan kemungkinan adanya upaya mengganggu pemerintahan Prabowo.

Namun, ia menegaskan bahwa dugaan makar belum menjadi bagian dari pasal yang diumumkan dalam penanganan perkara tersebut.

Ia menyebut, pembicaraan mengenai makar muncul dari analisis atas dugaan motif dan sejumlah informasi yang beredar. Karena itu, Mahfud mengingatkan bahwa dugaan tersebut masih harus dibuktikan.

"Ini analisis. Nanti kita buktikan di pengadilan," ujarnya.

Mahfud kemudian menyinggung dinamika politik yang berkembang, termasuk wacana mengenai masa jabatan Prabowo dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai sejumlah narasi politik yang berkembang belakangan perlu dilihat dalam kaitannya dengan dugaan upaya mengganggu pemerintahan.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan analisis Mahfud, bukan kesimpulan hukum mengenai adanya makar.

Dalam perbincangan itu, Mahfud juga menyebut adanya dugaan bahwa informasi hasil penyadapan digunakan untuk memetakan cara mengganggu pemerintahan. Ia kembali menekankan bahwa dugaan tersebut perlu diuji melalui proses hukum.

Klaim Penangkapan Sejumlah Perwira

Selain membahas dugaan motif, Mahfud mengungkap informasi yang menurut pengakuannya telah ia dengar sebelum kasus tersebut diumumkan secara …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Effendi Gazali Berani Pastikan Kasus Penyadapan Bakal Menyeret Jokowi: Ini soal Makar!

Oleh Redaksi · 4 Nov, 13.43 WIB



BANDA ACEH — Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali menegaskan penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit dan sejumlah petinggi kepolisian akan berdampak ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).“Pasti (berdampak ke Jokowi). Saya pastikan di sini pada malam ini ya. Saya pastikan di sini pada malam ini,” kata Effendi dalam program Rakyat Bersuara, dikutip dari YouTube Official iNews, Rabu (4/10/2026).

Meski begitu, dia berharap pernyataannya tidak terbukti.

“Mudah-mudahan setelah ini misalnya, ini dianggap apa, sesuatu yang gagal total pernyataan saya ini nanti Anda bisa lihat-lihat kembali karena apa?” ujar Effendi.

Pengajar di Universitas Indonesia itu mengungkapkan ada tiga hal penting dalam polemik penyadapan tersebut.

“Ada tiga hal penting. Yang pertama, selama ini orang menyatakan ada masalah dengan lingkaran Pak Prabowo,” imbuh Effendi.

Selain itu, dia melihat di internal pemerintaha, Prabowo kerap diberikan data yang keliru.

“Bukan cuma saya loh yang menyatakan. Bang Kurniawan juga mengatakan. Ada masalah dengan lingkaran dalam Pak Prabowo, misalnya itu ya, ada data yang disajikan keliru. Data-data disajikan asal Bapak senang,” ungkap Effendi.

Terakhir, dia menyebut sejak awal memang ada operasi politik. Effendhi menyinggung peruntukan penyadapan itu, serta kepada siapa hasilnya dilaporkan.

“Nah, yang ketiga yang lebih parah, operasi politik, disadap untuk mengetahui, kalau saya kaitkan dengan judul acara kita ya, putusan MK apa efeknya, untuk mengetahui nih Bapak Presiden ketemu siapa? Lalu menyatakan apa? Kurang lebih perasaannya ke mana? Lalu dilaporkan kepada siapa?” paparnya.

Effendi juga menyinggung pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setaidi. Saat itu, Budi mengatakan Prabowo bisa saja selesai masa jabatannya sebelum 2029.

“Pada hari ini saya mau menyatakan, yang mengatakan ada operasi politik kebetulan Pak Jokowi yang menyatakan akan selesai sebelum 2029, kebetulan projo, ya kan,” jelas Effendi.

“Dua kebetulan ini bagi saya akibatnya akan panjang,” sambung Effendi.

ACEH

Kapolda Aceh Dorong Sabang Jadi Gerbang Strategis Ketahanan Energi

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.40 WIB

BANDA ACEH — Sabang memiliki potensi besar menjadi gerbang strategis Indonesia dalam memperkuat ekonomi, kedaulatan maritim, dan ketahanan energi nasional. Namun, potensi tersebut perlu didukung infrastruktur memadai, kepastian regulasi, keamanan kawasan, serta kolaborasi lintas sektor.

Hal itu disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan saat menghadiri Seminar Nasional Lemhannas RI di Hermes Palace Hotel, Selasa (3/11/2026).

Dalam sambutannya, Ruddi mengapresiasi inisiatif Lemhannas RI yang mengangkat isu strategis tersebut. Menurutnya, ketahanan energi tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi, keamanan nasional, kedaulatan maritim, dan keberlanjutan pembangunan.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengikuti Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25 di Lemhannas RI. Pengalaman tersebut semakin memperkuat pemahamannya tentang pentingnya mengelola sumber daya alam secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan.

“Ketahanan energi merupakan aspek penting bagi masa depan bangsa dan kemakmuran masyarakat. Karena itu, pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ruddi menilai, letak geografis Sabang yang berada di dekat jalur pelayaran internasional, khususnya penghubung Samudra Hindia dan Selat Malaka, menjadi keunggulan strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pelayaran, logistik maritim, pelayanan kapal, hingga distribusi energi.

Meski demikian, pengembangan potensi tersebut harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepastian regulasi, serta kemudahan pelayanan investasi.

Kapolda Aceh juga menekankan tiga aspek penting dalam pengembangan Sabang, yakni penguatan fasilitas dan layanan maritim, peningkatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, serta jaminan keamanan dan kedaulatan kawasan.

“Keamanan merupakan prasyarat pembangunan berkelanjutan. Karena itu, menjaga kawasan maritim menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Ruddi berharap, seminar bertema “Sabang sebagai Gerbang Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Kedaulatan Maritim, dan Ketahanan Energi Nasional” tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pengembangan Sabang yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sabang memiliki potensi, Aceh memiliki peluang, dan Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Tantangan kita adalah mewujudkannya melalui kerja nyata, kolaborasi, dan perencanaan berkesinambungan,” tuturnya.

Kapolda Aceh didampingi Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar. Seminar tersebut turut dihadiri Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, serta sejumlah pejabat, akademisi, dan pelaku usaha.[]

ACEH

Respon Permintaan Wali Nanggroe, MA Siapkan Naskah Akademik Pendirian Peradilan Niaga Syariah di Aceh

Oleh Redaksi · 3 Nov, 19.31 WIB

BANDA ACEH – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) secara resmi merespons positif usulan Lembaga Wali Nanggroe untuk mendirikan Peradilan Niaga Syariah (Commercial Sharia Court) di Serambi Mekkah. Sebagai langkah konkret, MA saat ini tengah merampungkan penyusunan Naskah Akademik dan draf rancangan undang-undang terkait regulasi tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe Zulfikar Idris menyebutkan kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Kamar Agama MA RI Yasardin saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Senin (2/11/2026) malam.

“Kedatangan saya hari ini adalah untuk menginformasikan kepada Yang Mulia Paduka Wali Nanggroe Aceh mengenai tindak lanjut dari surat beliau terkait rencana pendirian Peradilan Niaga Syariah. Karena pembentukannya harus melalui undang-undang, Mahkamah Agung saat ini telah menyusun Naskah Akademik dan draft rancangannya,” ujar Yasardin di sela-sela jamuan makan malam.

Yasardin menjelaskan bahwa karena pembentukan peradilan khusus ini membutuhkan payung hukum setingkat undang-undang, MA telah bergerak menggalang dukungan lintas sektoral. Sosialisasi intensif kini tengah dilakukan ke berbagai instansi pembuat kebijakan, mulai dari Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dalam cetak birunya, Peradilan Niaga Syariah ini tidak hanya didirikan di Aceh, melainkan di beberapa titik strategis nasional yang menjadi pusat ekonomi syariah Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Tindakan Makar

Oleh Redaksi · 4 Nov, 08.36 WIB



BANDA ACEH - PDI Perjuangan mengapresiasi langkah tegas Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri sekaligus Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo.Partai berlambang banteng itu menilai pengungkapan kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memulihkan maruah kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang menjunjung hak asasi manusia dan demokrasi.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan praktik penyadapan ilegal yang disertai penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik merupakan pelanggaran serius. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai penyalahgunaan kewenangan.

"Penyadapan secara ilegal yang disertai penghapusan data elektronik hingga akses ilegal bukan hanya bentuk penyalahgunaan kewenangan, tapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat serius terhadap hak demokrasi dan sistem hukum nasional. Terlebih penyadapan ditunjukkan kepada Pesiden Prabowo sebagai kepala negara. Maka ini merupakan tindakan makar yang tidak boleh ditolelir," tegas Hasto di Jakarta, Selasa (3/11).

Hasto berharap pengusutan perkara ini tidak berhenti pada kasus yang telah terungkap. Dia mendorong aparat membongkar kemungkinan praktik serupa yang diduga pernah digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat.

Menurut Hasto, penanganan perkara penyadapan ilegal juga harus diikuti pembenahan di internal kepolisian. Upaya tersebut diperlukan agar penyalahgunaan kewenangan serupa tidak terulang pada masa mendatang.

Dia berharap Polri terus memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi serta melayani seluruh warga negara, dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

"PDI Perjuangan berharap penindakan terhadap penyadapan ilegal ini menjadi momentum bagi Polri untuk semakin meneguhkan tugas konstitusionalnya, yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi dan melayani warga negara, serta menegakkan hukum secara adil. Itulah mandat Polri sebagai alat negara," kata Hasto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sementara itu mengatakan kasus dugaan penyadapan ilegal oleh perwira tinggi Polri tidak terindikasi berkaitan dengan makar.

Yusril mengatakan berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada tiga tersangka, kasus tersebut merupakan dugaan penyadapan tanpa prosedural yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh ini, pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik dalam KUHP maupun UU ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar," kata …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Tunjuk Letjen Aryo Windutomo Jadi Plt KSP Gantikan Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.25 WIB



Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Keputusan tersebut telah ditandatangani melalui Keputusan Presiden (Keppres) pada Rabu (4/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, keputusan pemberhentian tersebut diambil langsung oleh Presiden pada Rabu pagi.

Untuk sementara, posisi Kepala Staf Kepresidenan akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

"Pada pagi hari ini tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Sebagai pengganti sementara, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Kesekretariatan Kepresidenan.

Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan arahan Presiden terkait penanganan persoalan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Menurutnya, Presiden telah memberikan petunjuk kepada Kapolri agar proses penanganan perkara dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasetyo menegaskan, Presiden meminta agar proses tersebut berjalan secara transparan tanpa ada informasi maupun fakta yang ditutupi.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi," jelasnya.

Arahan tersebut disampaikan menyusul adanya pertanyaan mengenai penanganan kasus yang turut menyeret sejumlah jenderal kepolisian.

Pemerintah meminta agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

ACEH

Perluas Akses Layanan, BBPOM Aceh Jalin Kerja Sama Penyelenggaraan MPP Sabang

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.56 WIB

SABANG – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperluas akses pelayanan publik agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Sabang bersama Pemerintah Kota Sabang dan sejumlah instansi vertikal lainnya, di Gedung MPP Kota Sabang, Senin (2/11/2026).

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, bersama BBPOM Aceh dan perwakilan instansi terkait. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, mudah diakses, efektif, dan efisien bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi vertikal yang telah bergabung dan berkomitmen memberikan pelayanan melalui MPP Kota Sabang. Ia berharap kehadiran berbagai layanan dalam satu lokasi dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi, perizinan, maupun memperoleh layanan publik lainnya.

“Dengan terintegrasinya layanan dari berbagai instansi di MPP Kota Sabang, tentunya akan memudahkan masyarakat Kota Sabang dan pengunjung yang datang untuk memperoleh pelayanan publik tanpa harus mendatangi banyak tempat,” ujar Zulkifli.

Bergabungnya BBPOM Aceh dalam penyelenggaraan MPP Kota Sabang menjadi langkah penting untuk mendekatkan layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan di bidang obat dan makanan kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mengurangi kendala jarak dan waktu bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang sebelumnya harus menempuh perjalanan ke Kota Banda Aceh untuk mendapatkan informasi dan konsultasi terkait obat dan makanan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kemudahan akses pelayanan, BBPOM Aceh menghadirkan perangkat ATM BPOM (Anjungan Tele-Yanblik Mandiri BPOM) di MPP Kota Sabang. Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, melakukan konsultasi, serta menyampaikan pengaduan terkait obat dan makanan dengan lebih mudah, cepat, dan hemat biaya.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi sarana alternatif bagi masyarakat untuk mengakses layanan BBPOM Aceh tanpa harus datang langsung ke kantor di Banda Aceh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Afdhal Khalilullah Kembali Dipercaya Pimpin Kwarcab Pramuka Banda Aceh

Oleh Redaksi · 3 Nov, 19.10 WIB

BANDA ACEH – Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, kembali dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Banda Aceh Periode 2026-2031.

Kepastian tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kota Banda Aceh yang digelar di Aula Balee Keurukon, Komplek Balai Kota, Selasa (3/11/2026). Peserta muscab secara aklamasi mendukung Afdhal sebagai ketua terpilih.

Muscab Pramuka Banda Aceh tahun ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Mabicab, Kwarda Aceh, para pejabat pemerintah kota, pengurus Kwarcab, DKC, serta seluruh Ketua Kwaran Gerakan Pramuka se-Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Afdhal mengucapkan syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh seluruh Kwartir Ranting dan peserta Muscab. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan estafet pembinaan karakter kaum muda di Banda Aceh.

“Bersama-sama kita telah mengukir banyak prestasi, mulai dari lahirnya puluhan Pramuka Garuda, konsistensi sebagai juara umum Musabaqah Tunas Ramadan, hingga kiprah di tingkat nasional. Capaian ini harus kita tingkatkan dan sempurnakan bersama,” ujar Afdhal.

Untuk periode 2026-2031, Afdhal mengusung Visi Berkolaborasi Membangun Pramuka Kota Banda Aceh yang Bertaqwa, Berkarakter, Kreatif dan Inovatif dengan 6 misi utama, meliputi penguatan IMTAQ dan IMTEK, hingga pembinaan karakter dan life skill.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Demokrat Masih Pelajari Putusan MA soal Suket SMA Gibran

Oleh Redaksi · 4 Nov, 09.08 WIB



BANDA ACEH -Partai Demokrat belum menentukan sikap Politik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi gugatan perbuatan melawan hukum mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan partainya masih mempelajari putusan tersebut secara serius, termasuk pertimbangan hukum majelis hakim, sebelum mengambil sikap.

Hinca menegaskan, pemahaman terhadap tahapan hukum tata usaha negara (TUN) perlu didahulukan sebelum persoalan tersebut dibawa ke ranah politik.

"Teman-teman, saya ingin menyampaikan informasi yang menurut pengetahuan saya bahwa tahapan-tahapan dari putusan tata usaha negara itu perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi, karena putusan Mahkamah Agung ini adalah kamar tata usaha negara, yang objeknya adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, itulah yang dibatalkan," ujar Hinca kepada wartawan, Rabu, 4 Oktober 2026.

Legislator Demokrat itu mengurai bahwa, putusan kasasi perkara TUN harus terlebih dahulu dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama. Menurut Hinca, terdapat tenggat waktu 14 hari kerja dalam tahapan tersebut sebelum konsekuensi hukum atas pelaksanaan putusan dapat dinilai.

"Jadi, kalau putus di Mahkamah Agung tadi kamar TUN tanggal berapa itung, 14 hari kerja putusan itu harus sudah kembali kepada PT TUN yang awal, yang mengadili pertama kali, ini kan kasasi itu, berarti PT TUN Jakarta, PTUN Jakarta. 14 hari kerja di situ. Artinya, jikalau tidak dieksekusi oleh si pejabat tata usaha negara itu, maka dia otomatis berlaku," jelasnya.

Atas dasar itu, Hinca meminta agar tahapan hukum tersebut dipahami terlebih dahulu sebelum partai politik menentukan posisi terkait putusan MA.

"Ketika teman-teman menanya sikap politiknya, saya mau jelaskan dulu tahapan itu. Berarti 14 hari kerja harus kita tunggu baru kemudian barangkali teman-teman akan menanyakan kepada partai-partai politik berkenaan dengan sikap politiknya," tegas Hinca.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, Demokrat ingin mempelajari salinan putusan secara utuh agar dapat memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

"Nah, bagaimana dengan Partai Demokrat? Partai Demokrat sedang mempelajari itu dengan sangat serius sampai kita mendapatkan salinan putusan itu secara utuh. Untuk apa? Supaya kita tahu pertimbangan hukum apa yang dijatuhkan atau yang diberikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kasus Penyadapan Mencuat, Prabowo Pernah Ingatkan Menteri Tak Telepon Hal Rawan: Banyak Telinga Ingin Dengar

Oleh Redaksi · 4 Nov, 09.15 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menggegerkan publik. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal Polri lain yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso diduga menjadi pelaku penyadapan.

Mencuatnya kasus penyadapan mengingatkan kembali pada ucapan Presiden Prabowo kepada para menterinya yang memperingatkan agar mereka tidak menyampaikan hal rawan lewat telepon. Ucapan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta pada 6 November 2024 lalu.

Prabowo mengingatkan, banyak pihak yang ingin mendengar percakapan penting antara presiden dengan menteri di telepon.

"Jadi silakan gunakan teknologi. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon ya kan. Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar. Tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal yang penting silakan, saya membuka pintu," kata Prabowo saat itu.

Presiden Pabowo memastikan, para menteri boleh berinteraksi dengan dirinya.

"Kalau saudara sudah menyampaikan ke menko tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya dan jangan ragu untuk telepon saya, saya terbuka. Saudara boleh telepon langsung," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal (illegal access). Salah satunya adalah mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh Politik, hingga kalangan media dan pengusaha.

Sementara tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, perwira yang menjabat di Lemdiklat Polri.

Tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian

NASIONAL

Mahfud MD: Penyadapan Presiden Prabowo Kejahatan Sangat Biadab

Oleh Redaksi · 4 Nov, 09.35 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai perkara paling serius yang pernah terjadi di tubuh Polri. Ia bahkan menyebut kasus tersebut lebih besar dibandingkan sejumlah skandal yang sebelumnya menyeret petinggi kepolisian.

Penilaian itu disampaikan Mahfud setelah munculnya kasus dugaan penyadapan terhadap komunikasi kepala negara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua petinggi Polri lainnya.

"Ini kejahatan paling besar sepanjang sejarah Polri," ujar Mahfud MD dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (4/11/2026).

Menurut Mahfud, kasus yang pernah mengguncang institusi kepolisian, seperti perkara Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, memiliki dimensi berbeda dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden. Persoalan kali ini dinilai menyentuh langsung keamanan dan kedaulatan negara.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kaitan perkara tersebut dengan dugaan makar. Namun, Mahfud menyebut perkembangan penyidikan masih perlu ditunggu.

"Tapi sekarang ini penyadapan yang nanti ada kaitannya dengan dugaan makar. Karena yang disadap kepala negara. Nanti kita lihat perkembangannya," kata Mahfud.

Mahfud mengaku sulit memahami dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden oleh aparat yang seharusnya menjalankan tugas menjaga keamanan negara. Menurutnya, perkara ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa karena berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Rakyat Indonesia tersinggung dan marah. Itu suatu kejahatan yang sangat biadab terhadap negara ini. Oleh sebab itu ini harus diseriusi," ungkap Mahfud.

Dalam perkara tersebut, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit Prabowo, dua perwira tinggi lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Irjen Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan bahwa ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pengusutan perkara bermula dari laporan seorang anggota Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal atau illegal access.

Bareskrim kemudian memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli untuk mendalami perkara tersebut. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, terdiri atas 11 unit telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Akbar Faizal: Jangan Kasih Ampun ke Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 4 Nov, 13.52 WIB



Mantan Anggota DPR RI Akbar Faizal. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto diminta tidak memberikan pengampunan kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Mantan Anggota DPR RI Akbar Faizal menilai, dugaan pengkhianatan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa.

Terlebih, tindakan tersebut diduga dilakukan oleh orang yang pernah mendapat kepercayaan dan kehormatan berupa jabatan Kapolri.

"Tak ada kejahatan yang sempurna. Membayangkan berapa kejahatan yang dilakukannya selama menjadi Kapolri. Berapa air mata yang tertumpah. Berapa hati yang ia tusuk dengan belati kewenangan dan pengaruhnya," tulis Akbar melalui akun X miliknya, Rabu, 4 November 2026.

Ia secara khusus meminta Prabowo tidak memberikan pengampunan karena menilai dugaan tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap negara sekaligus penghinaan terhadap kemanusiaan.

"Ini pengkhianatan terhadap negara dan penghinaan pada kemanusiaan. Dia tusuk Presiden dari belakang saat kehormatan berupa jabatan Bapak berikan kepadanya," tegasnya.

Di sisi lain, Akbar menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto karena dinilai telah menunjukkan bahwa hukum tidak mengenal senioritas maupun hubungan dengan mantan pimpinan.

Ia berharap Suyudi segera melakukan pembenahan internal Polri, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menjadi bagian dari jaringan mantan pimpinan tersebut.

"Organisasi Polri sangat matang dan tangguh untuk mengidentifikasi siapa saja jaringan jahat bekas pimpinan Anda ini. Tak mengapa mulai dari nol lagi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Nagara Institute itu mengaku mulai kembali menaruh kepercayaan terhadap institusi kepolisian setelah melihat langkah penegakan hukum tersebut.

"Hari ini saya mulai percaya lagi Polri bisa menjaga kami," pungkasnya.

NASIONAL

Irwasum: Ternyata Penyadapan Ilegal Listyo Cs Bukan Kebijakan Polri

Oleh Redaksi · 4 Nov, 08.48 WIB



BANDA ACEH -Tindakan ilegal akses berupa penyadapan yang dilakukan tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution bukan kebijakan Polri.

"Murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa malam, 3 November 2026.

Meski sudah ada penetapan tersangka, kasus ini masih dalam penanganan Bareskrim Polri dan Divisi Propam Polri.

"Itwasum Polri melaksanakan proses pengawasan terhadap proses pemeriksaan tersebut agar pelaksanaannya berjalan secara profesional dan proporsional," kata Asep.

Tiga tersangka kasus penyadapan atau dugaan ilegal akses ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP terkait akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana delapan tahun penjara

NASIONAL

Selamat Ginting Ungkap 11 Jenderal yang Diduga Terlibat, Ahrie Sonta Sempat Melawan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 09.33 WIB



BANDA ACEH — Dugaan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sejumlah perwira tinggi juga disebut terlibat dalam operasi yang diduga menggunakan perangkat penyadapan bernilai fantastis.

Analis Politik dan militer Universitas Nasional, Doktor Selamat Ginting, mengungkap kronologi dugaan penindakan terhadap sejumlah jenderal tersebut.

Dalam keterangannya di podcast Madilog Forum Keadilan yang dipandu sejarawan Indra J. Piliang, Ginting menyebut operasi bermula dari terdeteksinya aktivitas penyadapan di sejumlah lokasi.

"Mabes Polri dengan alatnya melihat bahwa ada radar yang sedang dimainkan. Ternyata kemudian ada di rumah Irjen Polisi Ahrie Sonta," ujarnya dalam wawancara itu sebagaimana dinukil Monitorindonesia.com, Selasa malam (3/11/2026).

Ginting juga menyebut aktivitas penyadapan diduga berlangsung di kediaman sejumlah perwira lainnya.

"Di waktu yang bersamaan, juga ternyata penyadapan itu sedang bekerja di rumah Irjen Polisi Slamet Uliandi. Kemudian juga di tempat Brigjen Polisi Eko Hadi Santoso."

Nama Ahrie Sonta menjadi salah satu yang mencuat dalam kronologi tersebut. Ginting menyebut personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri bersama Brimob mendatangi kediaman Irjen Pol Ahrie Sonta. Namun, kedatangan petugas itu disebut mendapat perlawanan.

"Karena melawan, ya sudah langsung diborgol, dibawa ke Mako Brimob," ujar Ginting.

Menurut Ginting, setelah dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Ahrie Sonta disebut mengakui bahwa operasi penyadapan dilakukan atas perintah Listyo Sigit Prabowo.

Pengakuan tersebut, menurut Ginting, kemudian membuka jalan bagi penindakan terhadap sejumlah nama lain yang diduga berkaitan dengan perkara itu.

"Kemudian terjadilah penangkapan-penangkapan juga termasuk kepada Irjen Polisi Abdul Karim, kemudian Irjen Polisi Nunung Saifuddin, dan juga kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," ujar Ginting.

Dugaan keterlibatan mantan Kapolri tersebut menjadi sorotan karena perkara ini disebut menyangkut penggunaan perangkat intelijen dan penyadapan yang diduga menyasar sejumlah pejabat negara.

Alat Sadap Triliunan Diduga Disalahgunakan

Ginting menyoroti perangkat penyadapan yang disebut memiliki nilai mencapai triliunan rupiah. Perangkat tersebut, menurutnya, dibeli menggunakan anggaran negara melalui APBN.

"Ini betul-betul negara dalam negara dan betul-betul ini penyalahgunaan alat-alat negara," ujarnya.

Ia menyebut perangkat tersebut awalnya berada di Badan Intelijen Negara (BIN), sebelum diduga berpindah ke Mabes Polri dan digunakan di sejumlah lokasi pribadi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sosok Ini Ungkap Dugaan Motif Listyo Sigit Sadap Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 08.41 WIB



BANDA ACEH - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memunculkan pertanyaan mengenai motif di balik tindakan tersebut.Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012-2016, Adrianus Meliala, menduga penyadapan tersebut bukan dilakukan untuk kepentingan negara maupun institusi Polri.

Adrianus justru mencurigai adanya kepentingan pihak lain di balik dugaan penyadapan tersebut.

Kriminolog Universitas Indonesia (UI) itu bahkan menyinggung kemungkinan adanya kepentingan Politik hingga utang budi politik.

"Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain," kata Adrianus kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2026).

Ia pun mempertanyakan alasan pimpinan Polri saat itu melakukan penyadapan yang diduga ditujukan untuk kepentingan pihak lain.

Adrianus Meliala Singgung Dugaan Utang Budi Politik

Adrianus menduga peristiwa penyadapan tersebut berkaitan dengan praktik politik atau adanya utang budi politik.

Menurutnya, keputusan menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka merupakan perkembangan yang tidak banyak diperkirakan sebelumnya.

Namun, ia menilai hal tersebut dapat dipahami dalam konteks dugaan keterlibatan Polri dalam aktivitas politik.

"Tentu keputusan menersangkakan LSP ini tidak ada yang menyangka. Namun, mengingat hal ini benar-benar terjadi, kelihatannya masih dapat dimengerti dalam konteks politicking tersebut. Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula," ucapnya.

Adrianus juga menyoroti posisi dan pangkat para pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Menurutnya, jabatan dan kewenangan dapat menjadi salah satu aspek untuk menelusuri pihak yang diduga memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan.

"Saya kira pendekatan pangkat juga menentukan siapa yang paling bersalah. Yang pangkatnya paling tinggi tentu bisa diduga yang menjadi intellectuelle dader dan sekaligus paling punya motif dan sekaligus intensi/tujuan," ujarnya.

Ia memperkirakan apabila penyidikan berkembang dan menetapkan tersangka tambahan, pihak tersebut kemungkinan berasal dari jajaran pelaksana.

NASIONAL

Penyadapan ke Presiden Dinilai Makar, Harus Diselidiki Siapa yang Menyuruh Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 4 Nov, 10.15 WIB



BANDA ACEH - Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi menyoroti ditetapkannya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM hingga pengusaha.

"Pertama, harus diselidiki siapa yang menyuruh Listyo Sigit menyadap presiden dan kawan-kawan," kata Pangi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.

"Listyo Sigit tetap bawahan. Artinya ada pemimpin di atasnya dia. Bekerja untuk siapa? Kalau menyadap presiden ilegal," sambung dia.

Menurut Pangi, pihaknya hanya fokus pada pertanyaan siapa yang menyuruh Listyo Sigit menyadap. Apalagi yang disadap Presiden.

Lebih lanjut, dia menilai penyadapan ilegal terhadap kepala negara masuk pasal makar. "Ini sudah makar serius," ucap Pangi menegaskan.

NASIONAL

Jejak Kedekatan Sinarmas dengan Jokowi Disorot, Pengamat Singgung Risiko Tebang Pilih Kasus Karhutla

Oleh Redaksi · 4 Nov, 09.31 WIB



BANDA ACEH - Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dikaitkan dengan jaringan bisnis Sinarmas Group menuai sorotan. Pemerintah didesak membuka perkembangan proses hukumnya, terutama setelah Singapura meminta klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait kabut asap lintas batas.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai transparansi menjadi ujian bagi pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap korporasi besar. Ia mengingatkan, perusahaan dengan jejaring bisnis dan akses kuat ke pemerintah tidak boleh mendapat perlakuan berbeda dalam proses pengawasan maupun penegakan hukum.

Sorotan ini turut menyeret rekam jejak relasi Sinarmas Group dengan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada 2021, Jokowi menunjuk Gandi Sulistiyanto, mantan eksekutif senior Sinarmas Group, sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Pada 2023, Gandi kemudian dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Hubungan dengan pemerintah juga terlihat di sektor investasi. Pada 2024, BSD City yang dikembangkan Sinarmas Land, anak usaha Sinarmas Group, masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan estimasi investasi Rp18,54 triliun.

Achmad menegaskan, rangkaian relasi tersebut bukan bukti adanya intervensi Jokowi dalam penanganan perkara karhutla. Namun, kedekatan antara kelompok usaha besar dan pemerintah perlu dicermati karena berpotensi memunculkan persoalan independensi regulator.

“Hubungan ini menunjukkan adanya akses institusional dan ekonomi antara konglomerasi dan pemerintah. Namun, hubungan tersebut bukan bukti bahwa Jokowi mengintervensi perkara karhutla,” ujar Achmad kepada media, Senin (2/11/2026).

Ia mengingatkan adanya risiko regulatory capture, yakni kondisi ketika kepentingan korporasi berpotensi memengaruhi independensi lembaga regulator dalam menjalankan pengawasan.

Jejak Bisnis dengan Keluarga Jokowi

Sorotan terhadap jejaring bisnis tersebut juga mencakup hubungan keluarga Gandi dengan keluarga Jokowi melalui PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat.

Perusahaan ini dibangun melalui PT Wadah Masa Depan milik keluarga Gandi bersama Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kaesang kemudian menjabat sebagai direktur utama GK Hebat.

Pada 2019, GK Hebat memperoleh pendanaan US$5 juta atau sekitar Rp71 miliar dari Alpha JWC Ventures. Perusahaan tersebut mengembangkan sejumlah bisnis kuliner dan usaha rintisan, di antaranya Sang Pisang, Yang Ayam, dan Ternakopi.

GK Hebat juga pernah mengakuisisi 8% saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) senilai sekitar Rp92 miliar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril: Sebenarnya Presiden Prabowo Sudah Tahu Jadi Korban Penyadapan Eks Kapolri Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 4 Nov, 09.22 WIB



Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. FOTO/Kompas.

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui dirinya menjadi korban penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Sudah barang tentu Presiden tahu, karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau," kata Yusril di kantornya di Jakarta, dikutip Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, penyadapan terhadap presiden dan sejumlah menteri ini bukan perkara biasa.

Oleh sebab itu, peristiwa ini menjadi hal yang dilaporkan ke Presiden.

"Bayangkan seorang Presiden diintersep, disadap, bayangkan para menteri disadap ya dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan. Itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal (illegal access).

Salah satunya adalah mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh Politik, hingga kalangan media dan pengusaha.

Sementara tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian.

Menurutnya, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Intercept Management System tanpa melalui proses verifikasi.

Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

NASIONAL

Kejahatan Listyo Sigit Lebih Biadab dari Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa

Oleh Redaksi · 4 Nov, 09.00 WIB



BANDA ACEH -Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara soal penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kejahatan paling besar sepanjang sejarah Polri," kata Mahfud dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official yang dilihat redaksi pada Rabu 4 November 2026.

Selama ini, kata Mahfud, publik melihat yang paling jahat di insitusi Polri dilakukan oleh dua mantan pejabat teras korps Bhayangkara, yakni Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa.

"Tapi sekarang ini penyadapan yang nanti ada kaitannya dengan dugaan makar. Karena yang disadap kepala negara. Nanti kita lihat perkembangannya," kata Mahfud.

Mahfud mengaku tidak habis pikir seorang Kapolri aktif melakukan penyadapan terhadap presidennya sendiri.

"Rakyat Indonesia tersinggung dan marah. Itu suatu kejahatan yang sangat biadap terhadap negara ini. Oleh sebab itu ini harus diseriusi," kata Mahfud.

Selain Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri turut menetapkan dua petinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Irjen Asep Safrudin mengatakan, ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terungkapnya kasus tersebut bermula dari laporan seorang anggota polisi yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik, serta ilegal akses pada 30 Oktober 2026.

Berangkat dari situ, Bareskrim Polri melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.

Selain pemeriksaan, Bareskrim turut menyita barang bukti berupa 11 handphone, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

NASIONAL

Skandal Listyo Sigit jadi Pintu Masuk Seret Jokowi-Gibran

Oleh Redaksi · 4 Nov, 11.02 WIB





BANDA ACEH - Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai berpotensi membuka persoalan yang lebih luas.

Pengamat Politik Faizal Assegaf melihat penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap pihak-pihak lain di balik dugaan penyadapan tersebut.

Termasuk kemungkinan keterkaitan dengan lingkaran kekuasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Skandal Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Prabowo jadi pintu masuk seret Jokowi dan Gibran. Peluang itu sangat terbuka atau hanya berhenti di separuh cerita," tulis Faizal melalui akun X pribadinya, dikutip Rabu, 4 November 2026.

Sorotan terhadap Jokowi tidak terlepas dari rekam jejak kedekatannya dengan Listyo Sigit. Hubungan keduanya telah terjalin sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo.

Kedekatan itu berlanjut ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden RI pada 2014. Listyo kemudian menduduki sejumlah jabatan strategis di kepolisian.

Riwayat hubungan tersebut membuat pengusutan kasus penyadapan menjadi perhatian tersendiri.

Terlebih, Faizal membuka kemungkinan perkara ini tidak berhenti pada Listyo dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Meski demikian, dugaan keterlibatan Jokowi maupun Gibran belum menjadi fakta hukum.

Penyidik masih harus membuktikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, Faizal memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran Mabes Polri yang menangani perkara tersebut.

"Terlepas dari spekulasi tersebut, publik beri apresiasi pada Kapolri Jend Suyudi dan Mabes Polri. Semoga tetap konsisten dan amanah," pungkasnya.

NASIONAL

Ahrie Sonta Nasution Lulusan Akpol 2002 Berprestasi Jadi Tersangka Penyadapan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 13.55 WIB



Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Nama Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution muncul dan jadi perbincangan publik karena terseret dalam kasus penyadapan dan ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ahrie bersama Irjen Eko Hadi Santoso dan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan.

Setelah ditelusuri, Ahrie merupakan salah seorang jenderal bintang dua Polri yang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002.

Bahkan saking moncernya karir Ahrie jadi satu-satunya di angkatan yang saat ini menjadi Irjen, padahal dua atau tiga angkatan di atasnya masih banyak yang menjabat dengan pangkat Komisaris Besar (Kombes).

Sebelum ditunjuk menjadi Kadivkum oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Ahrie pernah menjadi sekretaris pribadi (Sekpri) Listyo Sigit saat menjabat Kapolri.

Bahkan Ahrie terpilih menjadi salah seorang dari empat ajudan untuk Presiden Prabowo Subianto.

Selama menjabat, Ahrie kerap menempati posisi strategis mulai dari Polda Jawa Barat hingga Polda Metro Jaya.

Tercatat, Ahrie pernah menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, terlibat dalam pelaksanaan Operasi Nemangkawi di Papua, sampai jadi penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

ACEH

8 BERITA

ACEH

Kak Na: PAUD Holistik Integratif Penting untuk Penuhi Kebutuhan Dasar Anak

Oleh Redaksi · 4 Nov, 22.45 WIB



SUBULUSSALAM – Pembinaan Anak Usia Dini yang Holistrik Integratif merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak usia dini secara menyeluruh dan saling terkait. Karena itu, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Usman atau yang akrab disapa Kak Na saat berkunjung ke PAUD-TK Islam Nurul Ahmad, di Desa Sunulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Rabu (4/11/2026).

"Para Bunda-bunda semua merupakan elemen penting bagi upaya kita mewujudkan PAUD yang holistik dan integratif. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan atas dedikasi bunda semua untuk anandaananda kita di PAUD," ucap Kak Na.

Kak Na menambahkan, penyelenggaraan PAUD Holistrik Integratif merupakan upaya pemerintah untuk memperhatikan semua aspek kebutuhan anak secara utuh serta memberikan layanan secara terpadu melalui kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga medis, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait.

"Dengan berbagai tugas berat tersebut, maka kerja-kerja ini bukan hanya berada di satuan lembaga PAUD tetapi merupakan kerja besar kita semua, agar target untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045 dapat kita wujudkan," ucapnya.

Untuk itu, Kak Na kembali mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan cita-cita mulia ini.

Dalam sambutannya, Kak Na juga mengingatkan terkait kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang bertujuan untuk memperluas akses serta pemerataan mutu pendidikan dari jenjang prasekolah hingga tingkat menengah, termasuk 1 tahun di PAUD atau TK.

"Pemerintah dengan program Wajib Belajar 13 Tahun, telah memasukkan 1 tahun belajar di PAUD atau TK sebelum anak-anak kita melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi kita demi masa depan ananda kita semua," pungkasnya.

Selain itu, dia juga memotivasi anak-anak yang terlihat asik dengan berbagai permainan edukatif yang tersedia di PAUD tersebut. Kepada para siswa, Kak Na juga membagikan paket tas dan peralatan sekolah.

Pada kunjungan tersebut, Kak Na turut didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Fitriani Taufik serta Bunda PAUD Subulussalam Yarnida Zai serta sejimlah pejabat lainnya. []

ACEH

Wakil Wali Kota Sabang Hadiri Pertemuan Eksekutif CityNet, Perkuat Jejaring Kerja Sama Antarkota

Oleh Redaksi · 4 Nov, 20.02 WIB



SABANG – Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menghadiri 46th CityNet Executive Committee (ExCom) Meeting yang berlangsung pada 2-5 November 2026 di Hotel Pullman Jakarta Thamrin CBD. Pertemuan ini menjadi wadah memperkuat kolaborasi antarkota di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik dalam mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh CityNet National Chapter Indonesia (NCI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para bupati dan wali kota anggota CityNet NCI, serta berbagai lembaga mitra dan pengurus terkait.

Suradji mengatakan, forum CityNet menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi, membangun kemitraan, serta bertukar pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan.

"Setiap daerah tentu memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Melalui forum seperti ini, kita bisa saling berbagi pengalaman, belajar dari keberhasilan daerah lain, sekaligus membangun kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan masing-masing kota," ujarnya.

Selama kegiatan, peserta mengikuti sejumlah agenda, di antaranya ExCom Meeting, Jakarta SDG Showcase & Host City Awards, Jakarta Youth SDGs, 5th SDG City Awards, kunjungan lapangan teknis, serta Welcome & Farewell Dinner.

Menurutnya, berbagai agenda tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melihat langsung praktik pembangunan perkotaan, inovasi pelayanan, serta upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Bagi Kota Sabang, keikutsertaan dalam pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan jejaring kerja sama. Pengalaman serta praktik baik dari kota-kota lain dapat menjadi referensi untuk terus mengembangkan Sabang sebagai kota yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan," tambahnya.

Melalui keikutsertaan dalam forum CityNet, Pemerintah Kota Sabang diharapkan dapat memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai pemerintah daerah dan lembaga di tingkat nasional maupun Asia Pasifik, sekaligus membuka peluang kolaborasi untuk mendukung pembangunan Kota Sabang ke depan.[]

ACEH

Wali Nanggroe dan Kajati Aceh Sepakat Perkuat Sinergi Lembaga

Oleh Redaksi · 4 Nov, 19.45 WIB



BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, beserta rombongan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Selasa (3/11/2026).

Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, pertemuan itu menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara Lembaga Wali Nanggroe dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, khususnya dalam mendukung penguatan regulasi, tata kelola kelembagaan, serta pembangunan Aceh ke depan.

Rahmatsyah menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru Kejaksaan Tinggi Aceh.

Dia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga, termasuk dalam berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan kepentingan Aceh.

Kajati Aceh juga mengharapkan bimbingan, arahan, serta pandangan Wali Nanggroe dalam memahami sejarah, dinamika, dan arah pembangunan Aceh di masa mendatang.

Menurutnya, petuah dan pemikiran Wali Nanggroe menjadi masukan penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Aceh, terutama dalam memahami kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah peluang kolaborasi dalam penguatan landasan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan kelembagaan Wali Nanggroe.

Rahmatsyah berharap Kejati Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe dapat membangun kerja sama yang konstruktif, terutama dalam pembahasan dan penyusunan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan maupun qanun yang relevan dengan penguatan kelembagaan Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe menyambut baik semangat silaturahmi dan penguatan hubungan kelembagaan yang disampaikan Kajati Aceh.

Dalam konteks pembahasan tersebut, Wali Nanggroe menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman mengenai sejarah Aceh, kedudukan kekhususan dan keistimewaannya, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan perdamaian dan pembangunan daerah.

Wali Nanggroe memandang bahwa penguatan kelembagaan di Aceh perlu berjalan seiring dengan pemahaman terhadap sejarah dan landasan hukum yang melahirkan berbagai kewenangan khusus Aceh, termasuk keberadaan Lembaga Wali Nanggroe.

“Perdamaian Aceh yang telah terbangun harus terus dijaga melalui kerja sama seluruh unsur kelembagaan, dengan mengedepankan kepastian hukum, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, serta kepentingan masyarakat,” kata Wali Nanggroe.

Penguatan sinergi dengan Kejati Aceh juga dipandang sebagai bagian penting dalam membangun komunikasi yang konstruktif, terutama menyangkut berbagai aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan lembaga-lembaga di Aceh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kagama Aceh Barat Diharapkan Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Oleh Aceh Barat · 4 Nov, 10.27 WIB



Suasana khidmat para tamu undangan saat menghadiri sebuah acara formal kenegaraan.

MEULABOH – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM mendorong Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kontribusi pemikiran, gagasan, dan inovasi.

Hal itu disampaikan Tarmizi saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang (Pengcab) Kagama Kabupaten Aceh Barat periode 2025–2030 di Auditorium Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Selasa (3/11/2026).

Pengurus Kagama dilantik langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) RI, Nezar Patria, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kagama. Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan sarasehan pembangunan daerah bertema kolaborasi membangun ekonomi melalui hilirisasi potensi lokal, investasi, dan transformasi digital.

Dalam sambutannya, Tarmizi berharap kepengurusan Kagama yang baru dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan Aceh Barat.

Ia mengungkapkan, sekitar 10 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya pada jabatan asisten dan kepala dinas, merupakan alumni UGM. Jumlah tersebut belum termasuk sekretaris dinas dan kepala bidang.

Menurut Tarmizi, banyaknya alumni UGM yang menduduki jabatan strategis merupakan hasil penerapan sistem manajemen talenta dan penilaian berbasis prestasi.

“Kalau dulu mendapatkan posisi dengan cara melobi dan transaksi, sekarang jabatan diberikan berdasarkan prestasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penempatan pejabat dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, kapabilitas, dan loyalitas.

Tarmizi menegaskan, tantangan pembangunan daerah saat ini membutuhkan kerja sama tim yang solid, bukan mengandalkan kemampuan individu.

“Kita tidak bisa bekerja sebagai superman, tetapi harus bekerja dengan super tim. Dengan tim yang kuat, berbagai persoalan bisa diselesaikan,” ujarnya.

Ia optimistis jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Barat, termasuk para alumni UGM, mampu menghadirkan gagasan kreatif dan inovatif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Kami bersyukur memiliki tim yang kuat dan berharap kolaborasi ini dapat mewujudkan pembangunan Aceh Barat yang lebih baik,” tutup Tarmizi.

ACEH

Wagub Aceh Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.07 WIB



BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh T. Robby Irza dan Ketua Tim Satgas PRRP Wilayah Aceh Imran memimpin rapat percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh secara virtual, di Ruang Rapat Wagub Aceh, Rabu (4/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Fadhlullah menyampaikan beberapa hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota, meliputi mekanisme percepatan normalisasi sungai, penanganan daerah yang kembali terdampak banjir, serta percepatan penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam arahannya, dia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mendata sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi. Pendataan tersebut menjadi prioritas agar penanganan dapat segera dilakukan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan mencegah dampak yang lebih luas di daerah.

Selain itu, Fadhlullah menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, penanganan sungai yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme ini serupa dengan penanganan material kayu sisa bencana yang sebelumnya telah dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan normalisasi dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Data sungai yang disampaikan masing-masing daerah nantinya akan menjadi dasar koordinasi dengan Forkopimda dan aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan pekerjaan memiliki kepastian dan jaminan keamanan.

Selain normalisasi sungai, Fadhlullah juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila diperlukan. Penetapan status ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mempercepat penanganan bencana serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

"Bagi bupati/wali kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir dan membutuhkan penanganan segera, silakan menetapkan kembali status tanggap darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku guna mempermudah proses penanganan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah kabupaten/kota agar mempercepat penyerapan anggaran TKD sehingga dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk pemulihan pasca bencana.

Sementara itu, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan alat berat, terutama bagi daerah yang mengalami kerusakan parah. Proses pengadaan tersebut, ujar Wagub, saat ini tengah berlangsung di tingkat pusat.

Pada kesempatan itu, Pemerintah kabupaten/kota turut melaporkan perkembangan penanganan pasca bencana di daerah masing-masing sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kader PKK Aceh Didorong Aktif Berkoordinasi dengan Pemangku Kebijakan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.48 WIB



SINGKIL – Para pemangku kebijakan di daerah adalah orang yang paling mengerti kondisi daerahnya. Karena itu, kader PKK harus aktif berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan di wilayah masing-masing, karena ini menjadi kunci bagi suksesnya program pembangunan dan pembenahan kehidupan sosial yang merata.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, usai melakukan pembinaan dan penilaian Gampong Mawaddah Warahmah di Kantor TP PKK Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Selasa (3/11/2026).

"Kader PKK merupakan garda terdepan organisasi ini dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dengan 10 Program Pokok PKK, kita dituntut untuk terus bersinergi dan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan di daerah secara bertahap dan berjenjang untuk menyukseskan berbagai program dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera" ujar Marlina.

"Tanpa koordinasi yang baik, maka semua kerja-kerja kader akan sia-sia. Ingat, tanpa koordinasi maka Ketua TP PKK Pusat tidak mengetahui kendala PKK di tingkat provinsi. Demikian juga TP PKK Aceh tentu tidak mengetahui permasalahan dan kendala di tingkat kabupaten dan kota demikian seterusnya hingga tingkat kecamatan dan gampong," ucapnya.

Oleh karena itu, Marlina menyarankan para kader untuk selalu aktif berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan secara berjenjang.

"PKK Gampong bersama Geuchiek melapor ke kecamatan, camat melapor ke Bupati, bupati melapor ke Gubernur dan PKK Aceh, jika kendala tersebut tidak juga bisa ditanggulangi di Pemerintah Aceh, maka kami akan meminta bantuan ke Pemerintah Pusat, ke PKK Pusat," katanya.

Istri Gubernur Aceh itu meyakini, koordinasi aktif dan gerak bersama lintas sektor akan mempermudah upaya penyelesaian sebuah kendala atau masalah di lapangan.

Dalam arahannya, dia juga mengingatkan pemangku kebijakan memahami semakin luasnya tugas Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal Posyandu.

"Tugas kami di Posyandu semakin luas. Kini, Posyandu tidak lagi sebatas timbang-timbang badan balita, tugas kami lebih luas. Karena itu, sekali lagi, koordinasi adalah kunci untuk menyukseskan berbagai program kerja pemerintah," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Marlina juga sempat meninjau kebun toga PKK Desa Gosong Telaga Selatan yang sangat asri dan tentu saja sehat karena tak hanya hijau dipandang mata, kebun toga juga dipenuhi berbagai tanaman buah, obat dan sayur-mayur.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wagub Aceh Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.07 WIB



BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh T. Robby Irza dan Ketua Tim Satgas PRRP Wilayah Aceh Imran memimpin rapat percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh secara virtual, di Ruang Rapat Wagub Aceh, Rabu (4/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Fadhlullah menyampaikan beberapa hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota, meliputi mekanisme percepatan normalisasi sungai, penanganan daerah yang kembali terdampak banjir, serta percepatan penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam arahannya, dia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mendata sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi. Pendataan tersebut menjadi prioritas agar penanganan dapat segera dilakukan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan mencegah dampak yang lebih luas di daerah.

Selain itu, Fadhlullah menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, penanganan sungai yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme ini serupa dengan penanganan material kayu sisa bencana yang sebelumnya telah dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan normalisasi dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Data sungai yang disampaikan masing-masing daerah nantinya akan menjadi dasar koordinasi dengan Forkopimda dan aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan pekerjaan memiliki kepastian dan jaminan keamanan.

Selain normalisasi sungai, Fadhlullah juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila diperlukan. Penetapan status ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mempercepat penanganan bencana serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

"Bagi bupati/wali kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir dan membutuhkan penanganan segera, silakan menetapkan kembali status tanggap darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku guna mempermudah proses penanganan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah kabupaten/kota agar mempercepat penyerapan anggaran TKD sehingga dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk pemulihan pasca bencana.

Sementara itu, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan alat berat, terutama bagi daerah yang mengalami kerusakan parah. Proses pengadaan tersebut, ujar Wagub, saat ini tengah berlangsung di tingkat pusat.

Pada kesempatan itu, Pemerintah kabupaten/kota turut melaporkan perkembangan penanganan pasca bencana di daerah masing-masing sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Kota Soroti Kepastian Hukum untuk Dorong Investasi dan Pengembangan Sabang

Oleh Redaksi · 4 Nov, 10.46 WIB



SABANG – Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menghadiri Seminar Nasional bertema "Sabang sebagai Gerbang Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Kedaulatan Maritim, dan Ketahanan Energi Nasional" yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Aceh di Hermes Palace Hotel, Selasa (3/11/2026) sore.

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor, mulai dari Lemhannas RI, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Pertamina Niaga, hingga PT Trans Continent.

Forum ini membahas peluang dan tantangan pengembangan Sabang, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas maritim, serta meningkatkan ketahanan energi nasional.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa Sabang memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai hub internasional, khususnya sebagai pusat layanan dan aktivitas perdagangan maritim dunia.

Menurutnya, pengembangan potensi tersebut membutuhkan kajian komprehensif, termasuk pembenahan berbagai aspek yang berkaitan dengan biaya, efisiensi, dan konektivitas agar Sabang mampu menarik aktivitas perdagangan internasional yang selama ini melalui Selat Malaka.

Menanggapi hal itu, Zulkifli menyampaikan bahwa Sabang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama karena letak geografisnya yang berada di jalur pelayaran internasional. Potensi tersebut menjadi peluang bagi Sabang untuk mengambil peran lebih besar dalam aktivitas perdagangan dan konektivitas maritim dunia.

"Sabang memiliki posisi yang sangat strategis dan potensi yang besar untuk dikembangkan. Kita berharap keunggulan geografis ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga Sabang tidak hanya menjadi jalur pelayaran internasional, tetapi juga berkembang sebagai pusat aktivitas perdagangan, kepelabuhanan, dan investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Selain potensi geografis, Zulkifli juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, regulasi yang telah memberikan kemudahan bagi investor perlu dijalankan secara konsisten agar tidak menimbulkan keraguan dalam menanamkan modal, khususnya di Kawasan Sabang.

"Kita sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang memberikan ruang bagi masuknya investasi ke Sabang. Namun, ketika ada kebijakan atau pernyataan yang seolah-olah mengesampingkan aturan tersebut, tentu ini bisa menimbulkan keraguan bagi investor. Karena itu, kepastian hukum harus benar-benar dijaga agar para investor merasa aman dan yakin untuk berinvestasi di Sabang," jelasnya.

Zulkifli berharap, pengembangan Sabang mendapat dukungan dan kesamaan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah pusat, sehingga berbagai …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

3 BERITA

OPINI

Makar: Habisi Presiden Prabowo, Gibran Naik Jadi Presiden, Strategi Terakhir?

Oleh Redaksi · 4 Nov, 12.41 WIB



Jenderal Listyo, mantan Kapolri, bersama sejumlah jenderal dan perwira menengah lainnya, dikabarkan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Dugaan penyadapan komunikasi secara ilegal terhadap kepala negara, Presiden Prabowo, merupakan persoalan serius.

Jika terbukti, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menjadi pukulan terhadap kehormatan dan kredibilitas institusi kepolisian itu sendiri.

Pertanyaannya, mengapa Listyo melakukan semua ini? Apa motif di balik dugaan penyadapan komunikasi tersebut? Siapa yang memberikan perintah? Dan apa target Politik yang sesungguhnya ingin dicapai?

Inilah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum secara terbuka.

Dalam analisis penulis, apa yang diduga dilakukan Listyo bersama sejumlah perwira lainnya tentu menarik untuk dilihat lebih jauh. Apakah tindakan tersebut semata-mata merupakan inisiatif pribadi, atau ada kepentingan yang lebih besar di baliknya?

Publik selama ini mengenal Listyo sebagai sosok yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi. Tidak sedikit pengamat yang menyebutnya sebagai “anak emas” Jokowi.

Perjalanan karier Listyo hingga menduduki jabatan Kapolri selama kurang lebih lima tahun menjadi bagian dari dinamika hubungan kekuasaan tersebut.

Persoalan yang lebih mendasar adalah sejauh mana loyalitas personal kepada seorang mantan presiden dapat memengaruhi independensi dan profesionalitas institusi kepolisian.

Apalagi, ketika seseorang tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi masih memiliki pengaruh politik yang kuat. Di sinilah persoalan kekuasaan mulai menarik untuk dibedah.

Jokowi tentu masih menjadi bagian dari dinamika politik nasional. Sementara itu, Gibran sebagai Wakil Presiden berada dalam posisi strategis dalam struktur kekuasaan negara.

Artinya, tidak tertutup kemungkinan munculnya berbagai kalkulasi politik mengenai keberlanjutan kekuasaan dan masa depan politik keluarga Jokowi.

Dalam perspektif politik kekuasaan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ada skenario untuk mengantarkan Gibran menjadi Presiden sebelum tahun 2030?

Dugaan tersebut tentu harus diuji berdasarkan fakta, bukan sekadar asumsi. Dalam membaca politik kekuasaan, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai kemungkinan yang perlu ditelusuri secara serius.

Terlebih, polemik mengenai ijazah Jokowi dan Gibran yang selama ini menjadi perdebatan publik telah menambah panjang daftar persoalan politik selama ini.

Bunuh Presiden Prabowo Agar Gibran Naik Menjadi Presiden? Inilah dugaan paling serius yang harus diuji, bukan langsung diyakini sebagai fakta.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Profil 3 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Ada Eks Kapolri

Oleh Redaksi · 4 Nov, 08.56 WIB

OLEH: TIFANI

Mabes Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Tiga tersangka tersebut adalah anggota polisi aktif yaitu Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), serta dua jenderal bintang dua yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Para tersangka sudah ditahan di Mabes Polri dan akan dijerat dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Sementara, satu jenderal lain, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) masih berstatus sebagai saksi.

Listyo adalah eks Kapolri yang dicopot Prabowo pada awal Oktober ini, dan dilantik jadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kemudian Ahrie Sonta dikenal menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

Terakhir, Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) yang dikenal menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri. Berikut profil singkat tersangka kasus penyadapan Presiden.

Profil Listyo Sigit Prabowo

Listyo Sigit Prabowo merupakan eks Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ia mengakhiri masa tugasnya sebagai pimpinan Polri setelah menjabat selama lebih dari 5 tahun.

Listyo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

Setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, Listyo memulai kariernya sebagai perwira pertama di lingkungan Polri. Dalam perjalanan pendidikan di Polri, Listyo melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1998.

Ia kemudian mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2006, menyelesaikan pendidikan S-2 STIK-PTIK pada 2008, serta mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2017. Listyo mengawali kariernya sebagai anggota Polri dengan sejumlah penugasan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Pada 2009, ia menjabat Kapolres Pati. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Wakapolrestabes Semarang.Pada 2011, Listyo menjabat Kapolresta Surakarta.

Saat itu, Joko Widodo masih menjabat Wali Kota Solo. Keduanya kemudian kembali bekerja bersama ketika Listyo mendapat penugasan sebagai ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pada 2012, Listyo mendapat penugasan di Bareskrim Polri sebagai Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum. Setahun kemudian, ia menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Kariernya berlanjut ke lingkungan Istana Kepresidenan. Pada 2014, Listyo mendapat penugasan sebagai ajudan Jokowi.

Ia menjalankan tugas tersebut hingga 2016. Setelah itu, Listyo dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten pada 2016.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Motif Listyo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 09.04 WIB



Ketua KSP yang juga Mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo terlihat sedang memikirkan sesuatu untuk menyusun strategi busuk dengan menyadap Presiden Prabowo Subianto. FOTOIlustrasi AI.

Oleh: Ahmadie Thaha

EBUAH pertanyaan menggantung di langit Politik Indonesia hari ini: siapa yang sebenarnya menyuruh Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto?

Pertanyaan itu terasa semakin berat setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri tersebut sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.

Dua perwira tinggi Polri lainnya ikut terseret dalam perkara ini. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyidik juga menduga para tersangka menghapus jejak log pada Oktober 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendapat pertanyaan tentang motif di balik perkara ini. Jawabannya, saat jumpa pers di kantornya, singkat, "Wallahu a'lam."

Tentu Allah lebih mengetahui. Jawaban itu memang aman secara hukum. Namun, publik tentu membutuhkan jawaban yang lebih membumi: siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan siapa, dan ke mana hasil penyadapan mengalir?

Publik dengan enteng menghubungkan Listyo Sigit Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kariernya menanjak berkat hubungannya dengan Jokowi sejak di Solo.

Untuk jelasnya, mari kita mundur sedikit, melihat perjalanan seorang jenderal yang kini menghadapi perkara luar biasa serius dan mengguncang jagat nasional.

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon pada 5 Mei 1969. Ia lulus Akademi Kepolisian pada 1991. Kariernya bergerak melalui sejumlah jabatan kepolisian, termasuk Kapolres Solo pada 2011.

Ketika Jokowi masih memimpin Kota Solo, Listyo bertugas di sana. Pada 2014, setelah Jokowi menjadi Presiden, Listyo mendapat tugas sebagai ajudan Presiden hingga 2016.

Sesudah itu, ia memimpin Polda Banten, menjadi Kadiv Propam, lalu Kabareskrim. Pada 13 Januari 2021, Jokowi mengusulkan namanya sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR.

Dua pekan kemudian, pada 27 Januari 2021, Jokowi melantiknya menjadi Kapolri. Dalam waktu 30 tahun, ia sudah di puncak. Riwayat jabatan itu tercatat dalam profil resmi Polri.

Rangkaian tersebut memperlihatkan hubungan profesional yang panjang antara Listyo dan Jokowi. Ia menjadi ajudan, menduduki sejumlah jabatan strategis, sampai akhirnya menerima tongkat komando kepolisian tertinggi dari presiden yang sama.

Tentu, perjalanan karier seseorang tidak otomatis membuktikan hubungan patronase politik, meskipun publik dengan tak sabar mengira kuat begitu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

6 BERITA

TEKNOLOGI

Waspada! Spyware Canggih Incar Pengguna iPhone di Puluhan Negara, Begini Cara Melindungi HP

Oleh Van · 4 Nov, 21.54 WIB



Tampilan layar beranda iPhone yang rapi dengan berbagai aplikasi dan widget.

JAKARTA — Pengguna iPhone perlu mewaspadai ancaman perangkat lunak mata-mata atau spyware canggih yang dapat digunakan untuk menyerang perangkat secara tertarget.

Apple kembali mengirimkan notifikasi ancaman kepada sejumlah pengguna yang diduga menjadi sasaran serangan mercenary spyware. Dilansir dari lama The Telegraph Rabu, (4/11/2026) peringatan tersebut dilaporkan menjangkau pengguna di 99 negara.

Informasi mengenai gelombang peringatan terbaru ini disampaikan periset keamanan siber Costin Raiu melalui akun X miliknya @costinrau.

Dia menyebut notifikasi tersebut berbeda dari gelombang peringatan yang dikirim Apple pada Agustus 2026.

Apple menyatakan telah mengirimkan notifikasi ancaman kepada pengguna di lebih dari 150 negara sejak program peringatan tersebut dimulai.

Perusahaan tidak mengungkap identitas pelaku maupun wilayah geografis yang diduga menjadi sumber serangan.

Apa Itu Mercenary Spyware?

Mercenary spyware merupakan perangkat lunak mata-mata yang dikembangkan untuk menjalankan operasi pengawasan terhadap individu tertentu.

Berbeda dari malware yang menyebar secara massal, spyware jenis ini biasanya digunakan untuk menargetkan orang berdasarkan identitas, aktivitas, atau pekerjaan mereka.

Apple menjelaskan bahwa serangan semacam ini membutuhkan biaya dan sumber daya besar. Pengembangannya bahkan dapat menelan biaya hingga jutaan dolar AS.

Karena itu, target serangan biasanya bukan pengguna secara acak. Kelompok yang berisiko menjadi sasaran antara lain jurnalis, aktivis, politikus, diplomat, serta individu yang memiliki informasi strategis.

Apple juga menegaskan bahwa notifikasi ancaman dikirim ketika perusahaan memiliki tingkat keyakinan tinggi bahwa seseorang menjadi target serangan.

Namun, menerima peringatan tidak otomatis berarti perangkat sudah berhasil diretas.

Serangan Bisa Dilakukan Tanpa Korban Mengeklik Tautan

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam serangan spyware canggih adalah zero-click exploit.

Melalui metode ini, penyerang berupaya mengeksploitasi celah keamanan perangkat tanpa mengharuskan korban mengeklik tautan atau mengunduh berkas tertentu.

Jika serangan berhasil, penyusup berpotensi memperoleh akses ke informasi pribadi yang tersimpan dalam perangkat.

Informasi tersebut dapat mencakup pesan, riwayat panggilan, daftar kontak, lokasi, hingga foto dan video.

Meski demikian, Apple belum mengungkap metode teknis maupun celah keamanan yang digunakan dalam gelombang serangan terbaru.

Perusahaan juga tidak menyebut siapa pihak yang berada di balik operasi spyware tersebut.

Belum Diketahui Apakah Indonesia Terdampak

Hingga informasi ini disampaikan, belum ada daftar resmi negara yang menjadi sasaran notifikasi terbaru Apple.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Filipina Perlu Memposisikan Diri dengan Tepat, Jangan Biarkan Friksi Bilateral Meluber Menjadi Risiko Kawasan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.46 WIB



Belum lama ini, 22 organisasi bisnis, buruh, dan industri Filipina bersuara bersama untuk mengingatkan Manila: dalam hubungan ekonomi Tiongkok-Filipina, eksposur kepentingan ekonomi Filipina jauh lebih tinggi daripada ketergantungan Tiongkok pada pasar Filipina. Berdasarkan data Badan Statistik Filipina (PSA) semester pertama 2026, Tiongkok dan Hong Kong menyumbang 26,3% dari total ekspor Filipina dan 27% hingga 29,5% dari total impor; gabungan Tiongkok dan Hong Kong mencakup hampir 30% perdagangan internasional Filipina, sementara kontribusi Filipina terhadap total perdagangan global Tiongkok hanya 0,3% hingga 0,5%. Data ini adalah realitas yang harus dihadapi ASEAN secara serius ketika mengamati kebijakan luar negeri dan ekonomi Filipina.Kedua negara belakangan ini terus dilanda friksi akibat sengketa kedaulatan di Laut China Selatan, tetapi hal itu tidak serta-merta saling meniadakan dengan kerja sama ekonomi. Seruan bersama yang diprakarsai Kamar Dagang dan Industri Filipina (PCCI), Federasi Industri Filipina (FPI), Konfederasi Pengusaha Filipina (ECOP), Federasi Eksportir Filipina (Philexport), dan Asosiasi Industri Semikonduktor dan Elektronik Filipina (SEIPI) justru menunjuk pada satu logika pragmatis: sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, energi, dan ritel bergantung pada input industri, mesin, produk elektronik, dan bahan baku strategis dari Tiongkok; transisi energi bersih Filipina yang membutuhkan panel surya, kendaraan listrik, dan teknologi energi terbarukan juga tidak dapat dilepaskan dari rantai pasok Tiongkok. Setiap gangguan ekonomi yang diciptakan melalui konfrontasi terbuka akan pertama-tama menghantam biaya perusahaan, lapangan kerja, dan harga barang konsumen di Filipina.

Kelompok-kelompok bisnis tersebut secara tegas menyerukan penghindaran retorika provokatif, serangan pribadi, dan pernyataan di media sosial, serta meminta posisi resmi disampaikan melalui institusi yang ditunjuk dan saluran diplomatik yang telah ditetapkan. Ini adalah peringatan terhadap "diplomasi melalui media sosial". Jika perbedaan bilateral terus diperbesar oleh Politik domestik, ruang gerak Filipina sendiri akan menyempit, dan dampaknya akan meluber menjadi risiko kawasan. Anggota ASEAN lain juga sama-sama terintegrasi secara mendalam ke dalam jaringan produksi regional bersama Tiongkok; Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Singapura tidak ingin melihat isu Laut China Selatan diolah menjadi pemicu decoupling rantai pasok, penarikan investasi, atau konfrontasi blok. Jika Filipina mengemas sengketa bilateralnya sebagai agenda kolektif ASEAN dan menuntut negara anggota lain memilih pihak, pada dasarnya Filipina membiarkan seluruh kawasan menanggung biaya dari ritme unilateralnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Update Banjir Aceh, Ribuan Rumah Terdampak dan Ratusan Warga Mengungsi

Oleh Van · 4 Nov, 21.49 WIB



BANDA ACEH — Banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh masih berdampak pada permukiman warga hingga Rabu, 4 November 2026.

Sebanyak 2.255 rumah di Subulussalam terdampak, sementara ratusan warga Aceh Selatan mengungsi.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan BPBD setempat pada Selasa, 3 November 2026, banjir dipicu hujan deras dan luapan sungai di sejumlah daerah.

2.255 Rumah di Subulussalam Terdampak

Banjir di Kota Subulussalam berdampak pada 23 desa yang tersebar di tiga kecamatan. Selain rumah warga, jalan desa, lahan pertanian, sekolah, dan tempat ibadah turut terendam.

Kepala Pelaksana BPBA Bahron Bakti menyampaikan, “dampak material 2.255 unit rumah, lalu jalan desa, lahan dan kebun pertanian, sekolah serta tempat ibadah terendam banjir,” dalam laporan yang disampaikan di Banda Aceh, Selasa.

Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi sejak Sabtu, 24 Oktober 2026, memicu luapan Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit.

Sebanyak 32 kepala keluarga dilaporkan mengungsi. Air mulai surut di sejumlah titik Kecamatan Sultan Daulat, tetapi permukiman di Kecamatan Rundeng dan Longkib masih tergenang.

Ratusan Warga Aceh Selatan Mengungsi

Di Kabupaten Aceh Selatan, banjir melanda tiga gampong di Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah. Data BPBA mencatat 794 jiwa dari 222 kepala keluarga terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan Mudatsir mengatakan, “Banjir di kawasan Trumon Raya terus meluas. Jumlah warga yang mengungsi tercatat mencapai 205 jiwa. Sedangkan warga terdampak sebanyak 794 jiwa.”

Para pengungsi dievakuasi menggunakan perahu karet. Banjir terjadi setelah luapan sungai merendam permukiman warga sejak akhir Oktober hingga awal November.

Petugas Masih Memantau Kondisi Lapangan

BPBD setempat mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi, pendataan, dan pemantauan ketinggian air. Sejumlah wilayah mulai mengalami penyusutan genangan, tetapi rumah warga masih terdampak.

Masyarakat di kawasan rawan banjir diminta tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan debit sungai apabila hujan deras kembali turun.

Hingga Rabu, 4 November 2026, data yang tersedia masih mengacu pada laporan terakhir BPBA dan BPBD pada 3 November. Jumlah warga terdampak maupun pengungsi dapat berubah mengikuti pembaruan petugas di lapangan.(*)

SPORT

Dari Timnas hingga Liga Eropa, Begini Cara Suporter Indonesia Menikmati Sepak Bola

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.25 WIB



Sabtu sore masih bahas klub kota sendiri. Tengah malam, alarm dipasang buat nonton Liga Inggris. Begitu Timnas Indonesia main, teman yang biasanya cuma baca grup WhatsApp ikut nimbrung dan sudah punya usulan starting XI. Tiga suasana itu bisa datang dari grup yang sama, bahkan dari orang yang sama.Sepak bola di Indonesia punya banyak pintu masuk. Ada yang pertama kali kenal bola karena diajak keluarga ke stadion. Ada yang hafal nama pemain Eropa dari gim sebelum pernah menonton satu pertandingan penuh. Ada juga yang baru mulai ikut nonton karena penasaran kenapa teman-temannya selalu ramai setiap Timnas main. Dari mana pun mulainya, selalu ada klub, pemain, atau pertandingan yang bikin seseorang betah ikut ngobrol.

Timnas mempertemukan suporter dari klub yang berbeda

Di liga domestik, dua teman bisa menghabiskan akhir pekan saling ledek karena mendukung klub yang berbeda. Saat Timnas main, keduanya bisa duduk di meja yang sama dan sama-sama teriak ketika bola masuk ke kotak penalti lawan. Selera mereka soal pemain tetap berbeda. Yang satu ingin Garuda lebih berani menekan, sementara yang lain sudah puas kalau lini belakang rapi dan tim bisa keluar dari tekanan.Obrolannya juga sering berlanjut setelah pertandingan. Seorang pemain yang menarik perhatian bersama Timnas bisa bikin orang penasaran dengan perannya di klub. Di skuad Garuda ia mungkin lebih sering diminta menjaga posisi. Di klub, ia bisa punya ruang lebih besar untuk membawa bola ke depan. Mengikuti kedua konteks itu memberi bahan obrolan yang lebih menarik daripada sekadar menghitung gol atau assist.

Liga domestik punya cerita yang dekat dengan keseharian

Daya tarik liga Indonesia terasa bahkan sebelum kick-off. Ada perjalanan ke stadion, janjian di warung dekat pintu masuk, dan obrolan soal pemain muda yang akhirnya dapat kesempatan bermain. Bagi suporter yang tinggal jauh dari kota asalnya, mengikuti klub kesayangan juga bisa jadi cara sederhana untuk tetap merasa dekat dengan rumah.Cerita tiap klub berkembang sepanjang musim. Tim yang sering kehilangan poin di awal bisa mulai kelihatan lebih rapi setelah pelatih menemukan duet yang pas di tengah. Pemain muda yang awalnya cuma masuk pada menit-menit terakhir perlahan bisa mendapat kepercayaan lebih besar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Bencana: Keuntungan Bagi Para Koruptor

Oleh Ria Nurvika · 4 Nov, 14.35 WIB



Kopi hangat dan kamera klasik menemani pagi yang tenang di hari hujan.

Oleh: Ria Nurvika Ginting,S.H., M.H

ARA kebakaran di Kalimantan semakin hari semakin menyebar keseluruh penjuru.

Aktivitas masyarakat terdampak menjadi terganggu, udara menjadi menguning, asap bagai kabut yang tak kunjung usai hingga membatasi jangkau pandang yang akhirnya menyebabkan petaka di jalan-jalan umum.

Transportasi menjadi terganggu tetapi aktivitas keluar rumah tetap harus berjalan untuk menyambung hidup.

Sungguh, pemandangan yang sangat mengiris dan melukai hati.

Di tengah kondisi seperti ini, ternyata masih ada orang-orang yang menjadikannya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

Bima Setiawan, staf ahli di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam pemanfaatan anggaran bencana banjir di Aceh dan Sumatera hingga pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua untuk keuntungan pribadi.

Kasus korupsi dana bantuan bencana bukan baru kali ini terjadi. Hal ini berulang terjadi.

Bencana dijadikan kesempatan menuai keuntungan oleh pihak-pihak yang menjadikan bencana sebagai ladang korupsinya.

Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi korban bencana alam malah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku koruptor.

Para pejabat yang rakus dan nirempati ini lahir dari sistem kapitalis-sekuler yang diterapkan hari ini ditengah-tengah masyarakat.

Sistem ini berdiri atas dasar aqidah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang standarnya hanyalah materi.

Wajar ketika ada bencana dan seharusnya dikeluarkan dana untuk menyelesaikan bencana dan membantu para korban dengan rakusnya dan tanpa rasa bersalah dijadikan ajang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dana tersebut akhirnya diselundupkan oleh para koruptor. Sistem ini juga menjadi celah lahirnya para koruptor dikarenakan biaya untuk menjadi pemimpin dalam sistem ini membutuhkan modal yang besar.

Sehingga, salah satu cara mengembalikan modal tersebut adalah dengan melakukan korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan Islam.

Sistem Islam bukan hanya sekedar agama tetapi sistem yang telah memberikan solusi secara jelas dan tegas dalam mengatasi korupsi.

Hanya Islam yg mampu memberantas bahkan mencegah kasus korupsi melalui penegakkan 3 pilar penegakkan hukum, yaitu:

(1) Ketakwaan Individu yang mendorongnya untuk terikat pada hokum syara'.

Sehingga anadaikan ada peluang untuk korupsi ia akan ingat hal tersebut dapat mengundang murka Allah swt.

(2) kontrol Masyarakat. Kontrol individu maupun masyarakat terhadap individu lain sangat diperlukan karena manusia bukan malaikat.

Terkadang ia khilaf dan melakukan dosa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Mahasiswa USU Sosialisasikan Remaja Vitality Kit untuk Edukasi Gizi dan Hidrasi di SMAN 6 Medan

Oleh Explore Vipho GRAS · 4 Nov, 13.10 WIB



Momen kebersamaan penuh ceria antara siswa SMA Negeri 6 Medan dan para mahasiswa setelah menyelesaikan kegiatan edukasi.

MEDAN – Kelompok mahasiswa Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Kehidupan Sehat dan Sejahtera-34 Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar sosialisasi bertajuk "Remaja Vitality Kit: Media Interaktif Edukasi Gizi dan Hidrasi serta Proteksi Pergaulan Bebas" di SMA Negeri 6 Medan, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan ini diikuti 31 siswa sebagai upaya meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kecukupan hidrasi, dan perlindungan diri dari pengaruh negatif pergaulan bebas.

Program tersebut merupakan proyek pembelajaran MKWK yang melibatkan 20 mahasiswa dari berbagai fakultas di USU.

Melalui pendekatan edukasi interaktif, mahasiswa berupaya memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat sejak usia remaja.

Pemilihan tema Remaja Vitality Kit didasarkan pada penelitian awal kelompok yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran sebagian besar siswa SMA di Kota Medan mengenai pentingnya asupan gizi seimbang, kebutuhan hidrasi harian, serta pengaruh lingkungan pergaulan terhadap kehidupan remaja.

Ketua proyek, Hafiz Maulana, mahasiswa Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan kesehatan dan pergaulan bebas di kalangan remaja.

"Kami memilih tema ini sebagai wujud kepedulian kami sebagai mahasiswa yang melihat remaja, terutama di Medan, sangat kurang peduli terhadap pola makan dan kebutuhan hidrasi harian mereka. Selain itu, tingginya angka pergaulan bebas di kalangan remaja di Medan menegaskan betapa pentingnya memberi pemahaman kepada siswa melalui sosialisasi dan media yang interaktif sebagai wujud aksi nyata yang kami lakukan kepada siswa," ujar Hafiz.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh moderator, kemudian dilanjutkan dengan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai gizi, hidrasi, dan dampak negatif pergaulan bebas.

Selanjutnya, mahasiswa menyampaikan materi edukasi dengan melibatkan siswa secara aktif. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, peserta juga diajak mengikuti permainan teka-teki yang dirancang untuk meningkatkan fokus dan membangun interaksi selama kegiatan berlangsung.

Setelah seluruh materi disampaikan, siswa mengikuti post-test guna mengukur perkembangan pemahaman mereka.

Tiga peserta dengan hasil terbaik memperoleh hadiah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kemampuan mereka dalam memahami materi.

Selain penyampaian materi secara langsung, kelompok mahasiswa juga menghadirkan media edukasi berupa gantungan kunci yang dilengkapi kode QR (QR Code).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin